

LAPORAN KINERJA (LKj)



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusun Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanahkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja, yang merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis (Renstra).

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan dalam tahun 2023. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga perbaikan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Satpol PP dan Damkar untuk masa mendatang.

Palaohari, Januari 2024
KEPALA SATUAN,

MUH.KUSRI, SP
NIP. 19690315 199803 1 012



DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum.....	3
D. Cascading Kinerja/ Pohon Kinerja.....	4
E. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
F. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	24
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....	26
H. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	39
I. Sistematika Penyajian.....	41

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Visi RPJM.....	42
B. Misi RPJM.....	42
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	42
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	45
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	50

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	53
B. Akuntabilitas Keuangan.....	109
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023.....	109
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program....	114

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan.....	125
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	125

Lampiran

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Cascading / Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.. Laporan Kinerja (LKj) menyajikan capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan sasaran strategis selama tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis tahun 2018-2023 tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja.

Untuk tahun 2023 Satpol PP dan Damkar menetapkan 1 sasaran strategis, dengan 6 indikator. Selanjutnya dari sasaran dan indikator tersebut didukung dengan 3 program, 9 kegiatan dan 22 sub kegiatan.

Rata-rata Capaian Kinerja Kepala Satuan berdasarkan indikator kinerja dengan persentase penuntasan pelanggaran Perda dan Perkada serta penyelesaian gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 128 kasus dilaporkan dan sudah terselesaikan 128 kasus sehingga dianggap selesai 100%. Sedangkan untuk persentase penanganan kebakaran pemukiman 79 kejadian dan sudah terselesaikan sebanyak 79 kejadian dengan waktu 51,16 menit/ kejadian.

Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2023 dapat memenuhi target sesuai yang diharapkan dengan pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023 berorientasi pada sasaran meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatnya perlindungan masyarakat;

Untuk masa mendatang, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia dari segi kuantitas (tambahan pegawai baru);
2. Mengikutsertakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis;
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk penunjang pelayanan publik;

4. Mengoptimalkan koordinasi pemangku kepentingan sebagai informasi penting bagi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi berkala atas hasil kegiatan
6. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran strategis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi SAKIP. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja SKPD Satpol PP dan Damkar.

Dalam mewujudkan hal tersebut dibentuklah aparat penegak peraturan daerah yang memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 256, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Mengayomi Masyarakat.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap SKPD dalam rangka untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam Kepala Daerah mendukung melaksanakan pelaksanaan tugasnya menegakkan Peraturan Daerah mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten / Kota. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah memiliki kontribusi yang sangat penting untuk menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah dengan menciptakan pemerintahan yang baik dalam ranah penegakan peraturan daerah.

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran utama dalam memberikan keamanan dan ketertiban di masyarakat, dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat bekerjasama dengan Polri dan TNI dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi, sehingga dapat terwujud kondisi yang didambakan oleh masyarakat.

Masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat pada dasarnya merupakan masalah yang sangat serius, apabila tidak dijaga dan dipelihara dengan baik maka akan menimbulkan masalah / problem di masyarakat. Penyebab permasalahan yang timbul diakibatkan oleh kurangnya pengawasan. Kondisi tersebut membuat peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Stakeholder harus proaktif. Sinergisitas bersama stakeholder perlu ditingkatkan sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan yang lainnya. Sinergi terjadi ketika berbagai bagian organisasi berinteraksi untuk menghasilkan efek gabungan yang lebih besar daripada efek masing-masing bagian sehingga masyarakat akan merasa aman dan nyaman selama beraktivitas sehari-hari.

B. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKj

menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan Kinerja Satpol PP dan Damkar. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara

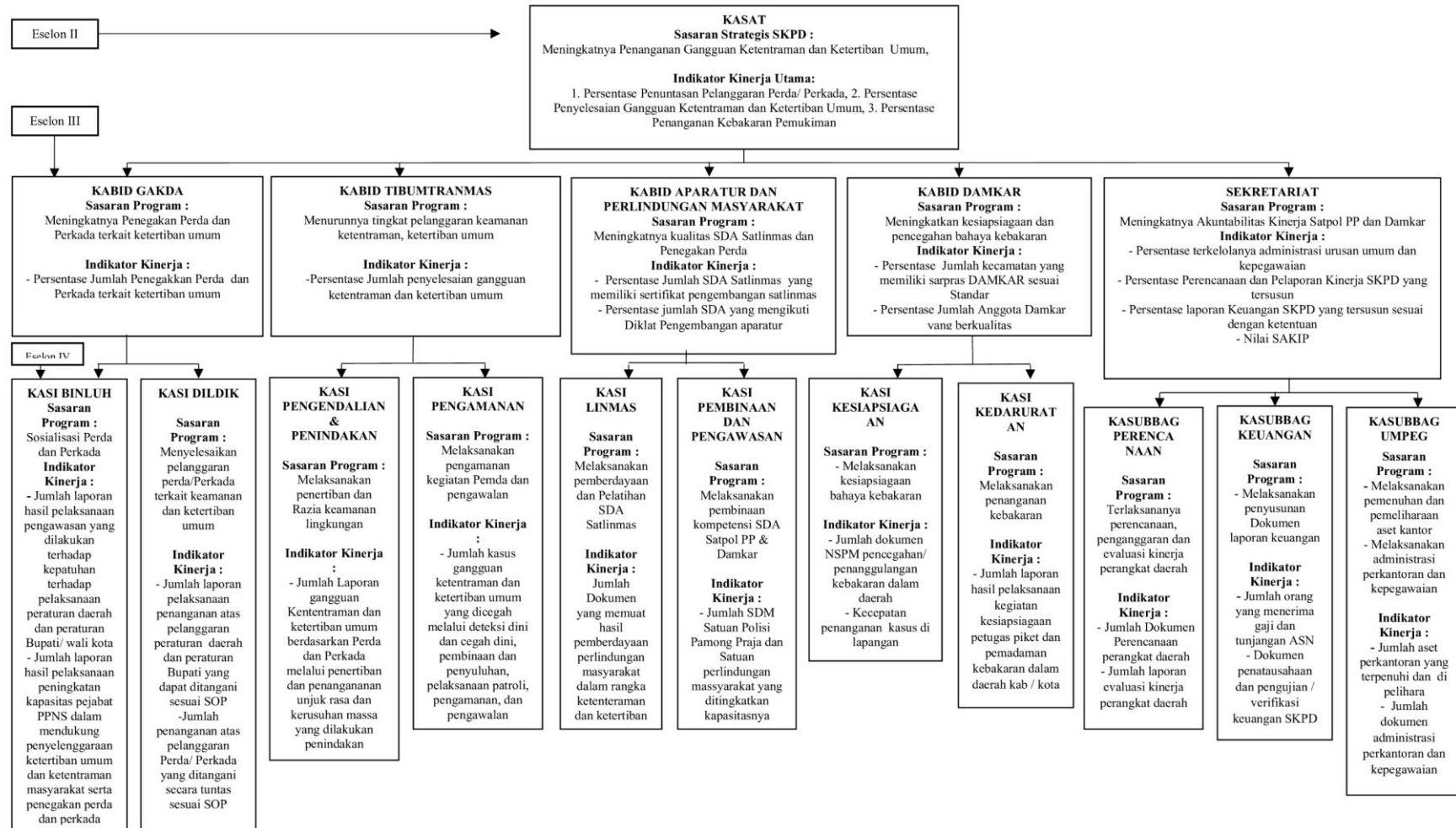
reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Menteri Peraturan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 313);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, Tanggal 27 Desember 2022;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 138 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

D. Cascading Kinerja / Pohon Kinerja

Matriks cascading kinerja / pohon kinerja berdasarkan RPJMD 2018-2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

CASCADING SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT



E. Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi

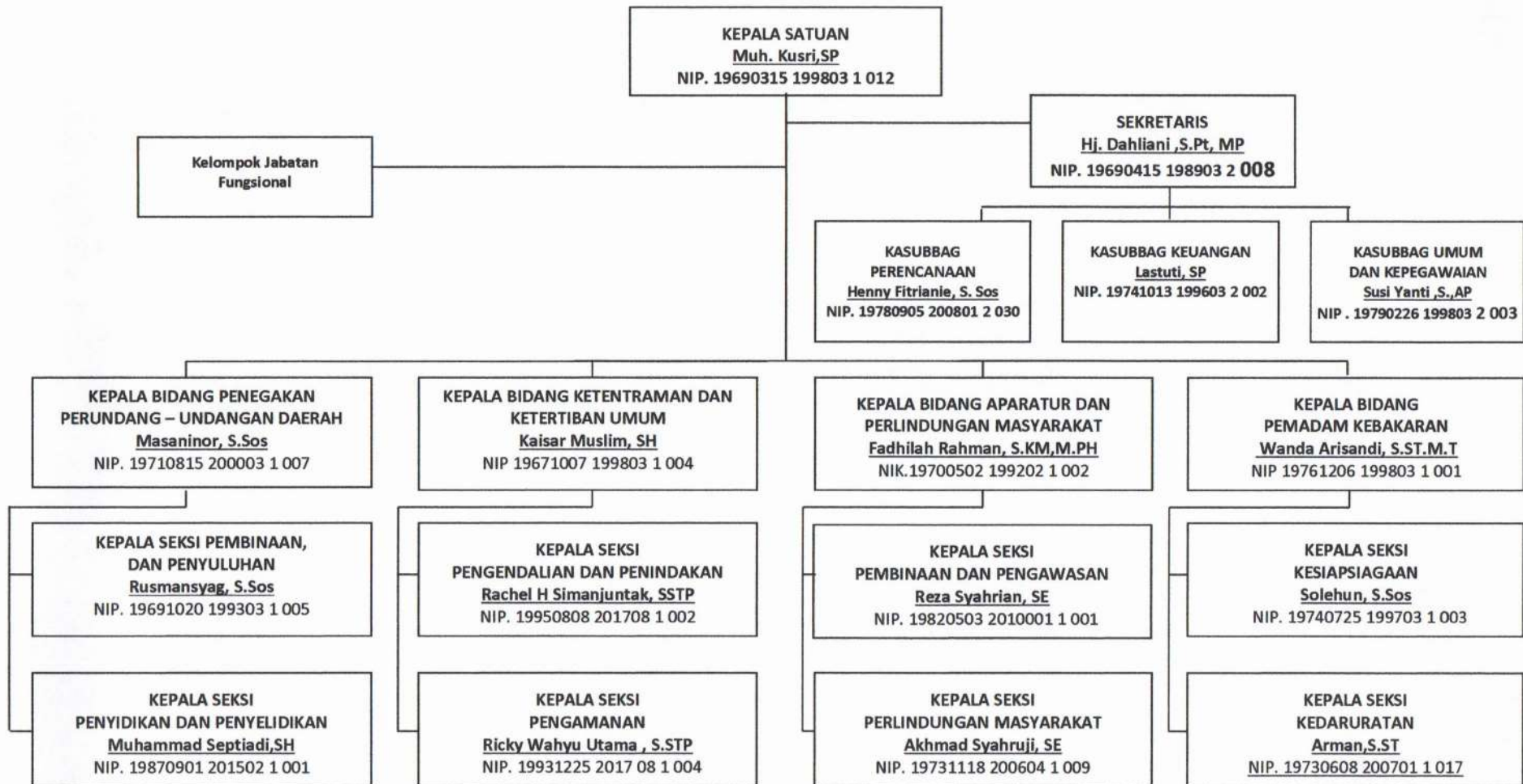
1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
2. Sekretaris;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - 1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 1) Seksi Pengendalian dan Penindakan;
 - 2) Seksi Pengamanan.
5. Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - 2) Seksi Perlindungan Masyarakat.
6. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - 1) Seksi Kesiapsiagaan;
 - 2) Seksi Kedaruratan.
7. UPTD;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT



Untuk melaksanakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pembinaan UPTD dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai:

1. Uraian Tugas Kepala Satuan sebagai berikut:

Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, sumber daya aparatur, dan pemadam kebakaran;

- (1) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan penyuluhan, penyidikan dan penyelidikan penegakan perundang-undangan daerah;
- (2) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian dan penindakan, pengamanan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;

- (3) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengawasan aparatur dan perlindungan masyarakat;
- (4) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang kesiapsiagaan dan kedaruratan pemadam kebakaran;
- (5) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan / atau Keputusan Bupati, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dan atau/aparatur lainnya;
- (6) Mengoordinasikan dan membina Kelompok Jabatan Fungsional;
- (7) Mengoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas UPT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (8) Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- (9) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
- (10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- (1) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- (4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset;

- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- (7) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- (8) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- (9) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- (10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- (11) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- (2) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (4) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- (5) Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- (6) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyampaian data dan statistik di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- (8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
- (9) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- (10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- (2) Melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- (3) Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- (4) Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- (5) Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- (6) Melaksanakan administrasi keuangan;
- (7) Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- (8) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (9) Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- (10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- (12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- (3) Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- (4) Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- (5) Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- (7) Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- (8) Menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- (9) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- (10) Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- (11) Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- (12) Melaksanakan telahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- (13) Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- (14) Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- (15) Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- (16) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (17) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

6. Uraian tugas Bidang Penegakan Perundang - Undangan Daerah sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang penegakan perundang - undangan daerah;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang - undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah;
- (4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyeledikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan daerah;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, dan memonitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;
- (7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perundang - undangan daerah;
- (8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

7. Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan penulhan;
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan dan penyuluhan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atasnya;
- (3) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam

rangka penegakkan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;

- (4) Menyiapkan bahan dan menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;
- (5) Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (6) Menyiapkan bahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan produk hukum daerah;
- (7) Menyiapkan bahansosialisasi dan melaksanakan penyuluhan masyarakat tentang ketentuan produk hukum daerah terutama produk hukum yang memuat ketentuan pemberian sanksi apabila dilanggar;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberitahuan tentang Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian pemahaman terhadap tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

8. Uraian tugas Seksi Penyidikan dan Penyelidikan sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyidikan dan penyelidikan;
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atasnya;
- (3) Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas ditemukan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah, peraturan Bupati

dan/atau keputusan Bupati sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

- (4) Menyiapkan bahan hasil temuan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang akan diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (5) Menyiapkan dan menganalisis bahan temuan atau patut diduga terjadinya tindak pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan langkah pengembangan lebih lanjut;
- (6) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyidikan dan Penyelidikan;
- (7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

9. Uraian tugas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang – undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Menyusun program, membina pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (4) Menyusun program, mengoordinasikan dan mengembangkan kerjasama teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, menganalisa data-data, laporan – laporan dan peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;

- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan patroli;
- (7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- (8) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

10. Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Penindakan sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian dan Penindakan;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian dan penindakan;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian dan penindakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian dan penindakan;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan penindakan;
- (6) Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, penertiban dan penindakan Non Yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (8) Menyiapkan bahan pembinaan penyuluhan untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat dalam menajaga ketentraman dan ketertiban umum;
- (9) Menyiapkan bahankoordinasi dan kerjasama dengan unsur keamanan dan ketertiban berupa deteksi dini dan upaya-upaya untuk mencegah timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- (10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penyelamatan;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengendalian dan Penindakan;
- (12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

11. Uraian tugas Seksi Pengamanan sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengamanan;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengamanan;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengamanan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengamanan;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengamanan;
- (6) Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi hubungan kerjasama teknis dan operasional dengan Instansi lain terkait pengamanan dan pengawalan pejabat dan kegiatan pemerintah serta penegakan hukum lainnya guna terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (7) Menyiapkan bahan dan membentuk Tim Patroli;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan Patroli;
- (9) Menyiapkan bahan dan menangani gangguan sesuai standar;
- (10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengamanan;
- (11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

12. Uraian tugas Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang – undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan aparatur, analisis dan penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidikan, pelatihan dasar dan teknis fungsional serta pembinaan kesamaptaan;
- (4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal pembinaan personil/aparatur;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta menangkal ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang meliputi pengerahan, pengendalian dan pembinaan potensi dan latihan;
- (7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur dan perlindungan masyarakat;
- (8) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

13. Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan dan Pengawasan;

- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan dan pengawasan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengawasan;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat;
- (6) Menyiapkan bahan dan merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan dibidang pelatihan dasar bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- (7) Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan pelatihan dasar bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pelatihan teknis fungsional bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- (9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- (10) Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Penyisik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

14. Uraian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat;

- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan masyarakat;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta keamanan lingkungan;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan;
- (8) Menyiapkan bahan, melaksanakan penyuluhan dan pembinaan pengarah, pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- (9) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- (10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

15. Uraian tugas Bidang Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pencegahan kebakaran;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan metode, prasarana dan sarana kebakaran;

- (4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dalam daerah kabupaten;
- (7) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi Pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (8) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan petugas pemadam kebakaran waktu tanggap kebakaran dalam daerah kabupaten;
- (9) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan kebutuhan dasar korban kebakaran;
- (10) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan pertolongan penyelamatan dan evakuasi korban jiwa, harta dan benda dalam daerah kabupaten;
- (11) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
- (12) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran;
- (13) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

16. Uraian tugas Seksi Kesiapsiagaan sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesiapsiagaan;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesiapsiagaan kebakaran;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kesiapsiagaan kebakaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesiapsiagaan kebakaran;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kesiapsiagaan kebakaran;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan sistem proteksi kebakaran;
- (7) Menyiapkan bahan, menganalisis, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pencegahan dan penyiagaan keandalan bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mengatasi ancaman bahaya kebakaran;
- (9) Menyediakan pelatihan pemadaman kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha;
- (10) Membentuk sukarelawan pemadam kebakaran dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten;
- (11) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembentukan satuan pelaksana pemadam kebakaran dipengelola gedung publik,pabrik/industri;
- (12) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar);
- (13) Menyiapkan bahan dan menyusun sistem ketahanan kebakaran pengelola bangunan gedung publik, pabrik/industri, perkebunan dan hutan;
- (14) Menyusun sistem ketahanan kebakaran lingkungan bagi masyarakat;

- (15) Menyusun pedoman peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (16) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan rutin pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- (17) Menyediakan peralatan proteksi kebakaran di ruang publik sesuai standar;
- (18) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran kepada masyarakat;
- (19) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;
- (20) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

17. Uraian tugas Seksi Kedaruratan sebagai berikut:

- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Kedaruratan;
- (2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kedaruratan kebakaran;
- (3) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kedaruratan kebakaran sesuai dengan ketentuan di atasnya;
- (4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemadaman kebakaran secara tepat, akurat dan efisien;
- (5) Menyusun pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem, metode dan peralatan pemadaman kebakaran;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk dalam daerah Kabupaten;
- (8) Menyiapkan bahan, menganalisis, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan kebakaran untuk memperkecil korban dan kerugian harta benda akibat kebakaran;

- (9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun dalam kabupaten;
- (10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kedaruratan;
- (12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinamika perkembangan diluar organisasi juga turut mempengaruhi proses pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta kebakaran. Keberhasilan gerakan reformasi adalah salah satu yang berpengaruh melalui adanya berbagai tuntutan masyarakat dengan tema utama desentralisasi dan demokratisasi. Desentralisasi mengidealkan adanya keadilan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, sedangkan untuk demokratisasi mengidealkan proses tranparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada publik. Semua itu mengharuskan adanya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah baik dipusat maupun didaerah. Salah satu aspek penting dalam inplementasi otonomi daerah adalah peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah mengingat otonomi daerah juga membutuhkan sumber daya yang berkualitas, termasuk di dalamnya pemberdayaan kualitas PNS perempuan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional yang mengamanatkan pentingnya pengembangan kebijakan yang responsif genjer.

Pengarusutamaan genjer merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan genjer dengan memperbaiki kondisi dan posisi perempuan dapat setara diberbagai sektor pembangunan. Hal ini mengingatkan perempuan lebih banyak jumlah nya dari laki-laki, yang akan menjadi beban pembangunan apabila perempuan tidak mau maju, karena dengan kualitas hidup perempuan yang prima akan menjadi aset pembangunan yang potensial dan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan genjer. Perhatian dan komitmen pemerintah nasional dalam rangka

pemberdayaan perempuan dan pembangunan perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Adanya perhatian dan terlibatnya masyarakat perempuan melalui pemberdayaan diharapkan akan mendukung sikap responsif perempuan dalam meningkatkan perannya di sebagai bidang pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi yang di jalankan adalah merumuskan kebijakan teknis, menyiapkan dan menyusun Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaan tugas terdapat beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Masih terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Masalah tersebut disebabkan karena kurangnya kemampuan aparat dalam berkomunikasi dengan masyarakat sehingga sering terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum

2. Masih ditemukan penjualan minuman keras

Masalah tersebut disebabkan karena masih adanya / masih memproduksi minuman keras yang dijual bebas dilingkungan masyarakat serta kurangnya komunikasi aparat dengan masyarakat sehingga sering terjadi gangguan ketentraman masyarakat

3. Belum optimalnya penerimaan masyarakat terhadap keberadaan Satpol PP dan Damkar

Masalah tersebut disebabkan karena adanya perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan sehingga muncul lah imej negative terhadap anggota Satpol PP dan Damkar

4. Belum optimalnya penyampaian aspirasi masyarakat

Masalah tersebut disebabkan karena masih adanya atau terlalu banyak kepentingan sehingga sering terjadi bentrok antar masyarakat yang menyebabkan demo

5. Belum optimalnya perekrutan SDM anggota Satpol PP dan Damkar

Masalah tersebut disebabkan karena belum menguasai tugas pokok dan fungsi sehingga menempatkan posisi tidak sesuai dengan latar belakang Pendidikan / atau tidak relevan dengan tugasnya

6. Tingginya mobilitas dan mobil pemadam kebakaran yang kurang menyebabkan pemeliharaan tertunda

Masalah tersebut disebabkan kurangnya pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran sehingga sarana dan peralatan pemadam tidak siap dalam kondisi prima

7. Belum optimalnya mempedomani risiko yang akan muncul pada pelaksanaan kegiatan

Masalah tersebut disebabkan karena penyusunan rencana awal yang tidak cermat sehingga tujuan dari program tidak tercapai

8. Tidak tersampainya komunikasi secara baik dan benar

Masalah tersebut disebabkan karena kemampuan berkomunikasi kurang sehingga terjadi tidak efektifnya komunikasi dengan pelaku usaha

9. Belum optimalnya antar tim dalam berkoordinasi

Masalah tersebut disebabkan karena koordinasi antar tim kurang sehingga PAD tidak mencapai target

10. Belum optimalnya penyelesaian terhadap kasus

Masalah tersebut disebabkan karena kurang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga untuk merevisi SOP tidak terlaksana

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana Dan Anggaran

1. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pencapaian kinerja kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor

penunjang yang sangat terkait dengan sumber daya internal kelembagaan yaitu:

- a. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integrasi diri yang baik;
- b. Dukungan sarana prasarana penunjang kinerja yang andal;
- c. Dukungan anggaran yang proporsional dan berbasis kinerja;
- d. Serta sistem dan mekanisme internal yang baik.

Kondisi sumber daya manusia sangatlah penting guna peningkatan terhadap keamanan dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat sampai dengan tahun ini jumlah pegawai yang ada sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) orang diantaranya 40 orang Pegawai Negeri Sipil dan 173 orang Pegawai Tidak Tetap terdiri dari:

1. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin:
 - 1) Laki-laki : 36 Orang
 - 2) Perempuan : 4 Orang
2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap berdasarkan Jenis Kelamin:
 - 1) Laki-Laki : 159 Orang
 - 2) Perempuan : 14 Orang

Tabel 1.1.1
Jumlah Pegawai Pergolongan / Pendidikan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2023

Golongan/Kepangkatan					Jlh	Pendidikan							Jlh
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I			S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
5	20	11	2		42	3	14	1	-	20	-	2	40

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.1.2
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) / Pendidikan
Tahun 2023

Pendidikan						Jumlah
S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
13	4	-	146	1	-	164

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

Jika melihat pada penjelasan data kepegawaian tersebut diatas, terdapat beberapa kesimpulan yang penting untuk diperhatikan terkait dengan harapan peningkatan pencapaian kinerja kelembagaan. Fakta atas kondisi tersebut jelas merupakan tantangan kedepannya dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kelembagaan, dan hal tersebut juga terdapatnya berbagai strategi dan kebijakan serta progam dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia aparatur, sehingga dapat secara signifikan memberikan kontribusi maksimal bagi upaya peningkatan kinerja pelayanan kelembagaan.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu instrumen penting penunjang kinerja organisasi dimana ketersediannya jelas merupakan peningkatan kinerja SKPD.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Satpol PP dan Damkar tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.1
Daftar Inventaris Barang Tahun 2023

No.	Jenis Barang	Jumlah (Volume)	Keadaan		Ket.
			Baik	Rusak	
1.	Tanah Bangunan Kantor	400 M2	1	-	Tanah tersebut merupakan bagian dari sertifikat Kantor Bupati
2.	Station Wagon	1	1	-	Kendaraan Roda 4
3.	Micro Bus	1	1	-	Kendaraan Roda 4
4.	Mini Bus	4	4	-	Kendaraan Roda 4
5.	Truck	1	1	-	Kendaraan Roda 6
6.	Pick Up	3	3	-	Kendaraan Roda 4
7.	Sepeda Motor	16	15	1	Kendaraan Roda 2
8.	Mobil Pemadam Kebakaran	8	7	1	Kendaraan Roda 6
9.	Caravan	1	1	-	Bak Mobil Rakitan
10.	Portable Water Pump	1	1	-	
11.	Pompa Air	1	-	1	
12.	Jet Shooter	21	19	2	Pompa Punggung
13.	Selang Air	70	59	11	Selang Pemadam
14.	Pulaski Axe (Kapak Dua Fungsi)	8	8	-	Kapak Rescue
15.	Mesin Gerinda Tangan	1	1	-	
16.	Mesin Gergaji	1	1	-	Mesin Chain Saw Mini
17.	Mesin Cuci Kendaraan	1	1	-	
18.	Termometer Standart	1	1	-	
19.	Lemari Besi/Metal	2	2	-	
20.	Lemari Kayu	2	2	-	
21.	Rak Besi	8	8	-	
22.	Rak Kayu	4	4	-	
23.	Filing Cabinet Besi	12	12	-	
24.	Brandkas	1	1	-	

25.	CCTV - Camera Control Television System	1	-	1	
26.	Papan Visual/Papan Nama	3	3	-	Running Text, Neon Box Papan Nama, Neon Box Logo
27.	Mesin Laminating	1	-	1	
28.	Papan Pengumuman	13	13	-	Papan Himbauan/ Larangan
29.	Sirine	14	12	2	Lampu Sirine/ Rotary
30.	Meja Kerja Kayu	27	25	2	
31.	Kursi Besi/ Metal	2	2	-	
32.	Meja Rapat	12	3	9	
33.	Tempat Tidur Besi	8	7	1	Velbed
34.	Kasur/ Spring Bed	12	12	-	
35.	Kursi Rapat	4	3	1	
36.	Kursi Biasa	27	20	7	
37.	Sofa	3	1	2	
38.	Meubeleur lainnya	19	19	-	Lemari Pajang dan Lemari Loker Anggota
39.	Mesin Pemotong Rumput	2	1	1	
40.	Alat Pembersih Lainnya	1	-	1	Tong Sampah
41.	Lemari Es	2	2	-	
42.	A.C. Split	20	15	5	
43.	Kipas Angin	4	4	-	
44.	Treng Air/ Tandon Air	1	1	-	
45.	Rak Piring Alumunium	1	1	-	
46.	Televisi	10	6	4	
47.	Sound System	1	1	-	
48.	Megaphone	2	2	-	
49.	Camera Video	2	-	2	
50.	Tangga Aluminium	9	9	-	

51.	Handy Cam	1	-	1	
52.	Alat Pemadam/ Portable	12	11	1	Apar
53.	Alat Pemadam/ Portable	1	1	-	Mesin Pompa Portable
54.	Pompa Kebakaran/ Portable	8	7	1	Mesin Portable/ Alkon
55.	Pakaian Panas/ Lengkap	31	31	-	Baju Pemadam Kebakaran Tahan Panas
56.	Topeng (Masker) Oxygen	12	11	1	Masker
57.	Alat Pembantu Kebakaran	3	-	3	Senter Pemadam
58.	Alat Pembantu Kebakaran	5	5	-	Lampu Sorot Portable
59.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	4	4	-	Konper Pistol
60.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	6	6	-	Alat Penangkap Ular
61.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	7	7	-	Alat Pemotong Cincin
62.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	6	6	-	Nozzle Pistol
63.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	6	4	2	Nozzle Stick
64.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	15	15	-	Ypice Connection
65.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	1	-	Breathing Apparatus
66.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	6	6	-	Tali Carametel
67.	Meja Kerja Pejabat Esselon II	1	1	-	
68.	Meja Kerja Pejabat Esselon III	5	5	-	
69.	Kursi Kerja Pejabat Esselon II	1	1	-	
70.	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	5	5	-	
71.	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5	5	-	
72.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	1	-	Sofa
73.	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1	1	-	
74.	Peralatan Studio Audio lainnya (dst)	1	-	1	Drone
75.	Camera Electronic	3	2	1	
76.	Tripod Camera	1	1	-	

77.	Layar Film/Projector	2	1	1	
78.	Pesawat Telephone	1	1	-	
79.	Handy Talky	72	4	68	
80.	Alat Komunikasi Telephone lainnya (dst)	4	2	2	Pesawat Orari Rig
81.	Unit Tranceiver VHF Portable	1	-	1	Pesawat Orari Rig
82.	Alat Komunikasi Radio VHF lainnya (dst)	3	3	-	Antena Mobil
83.	Alat Komunikasi Radio VHF lainnya (dst)	8	8	-	Pesawat Orari Rig
84.	Antene HF/SW Stationary	1	1	-	Antena Orari Damkar
85.	Antene VHF/FM Stationary	1	1	-	Antena Orari Mako
86.	Genset	1	-	1	
87.	Boneka	4	4	-	Manekin
88.	Uninterrupted Power Supply (UPS)	12	4	8	
89.	Pistol	1	1	-	
90.	Alat Khusus Keamanan lainnya	8	8	-	Alat Penangkap Ular
91.	Tameng	64	64	-	
92.	P.C Unit	21	19	2	Komputer
93.	Laptop/ Note Book	11	7	4	
94.	Printer	27	20	7	
95.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	3	-	
96.	External/ Portable Hardisk	2	2	-	
97.	Baju Pengaman lainnya (dst)	12	8	4	Baju Penangan Lebah/ Tawon, Wabah dan Binatang lainnya
98.	Helmet	40	39	1	Alat Pelindung Kepala/ Helm Anti Api Lokal
99.	Sepatu Boot	41	41	-	Sepatu Boots Pemadam
100.	Dongkrak Mobil	8	8	-	Dongkrak Botol 20 Ton
101.	Toolkit	7	7	-	Box Perkakas Mekanik Mobil
102.	Bangunan Gedung Kantor	1	1	-	Bangunan Kantor

	Permanen				SATPOLPPDK
103.	Gedung Pos Jaga Permanen	6	6	-	Posko Damkar
104.	Gedung Garasi/ Pool Semi Permanen	1	1	-	Parkir Unit Damkar
105.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	1	-	Tower Air
106.	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	1	-	Tempat Parkir
107.	Taman lainnya	1	1	-	Taman Kantor
108.	Sumur Artesis	1	1	-	Sumur Bor
109.	Sumur Resapan	1	1	-	Instalasi PDAM
110.	Terompet	8	7	1	Alat Musik Marching Band
111.	Mellophone	5	5	-	Alat Musik Marching Band
112.	Baritone	5	5	-	Alat Musik Marching Band
113.	Tuba	2	2	-	Alat Musik Marching Band
114.	Belira	8	8	-	Alat Musik Marching Band
115.	Bass	4	4	-	Alat Musik Marching Band
116.	Tenor	4	4	-	Alat Musik Marching Band
117.	Tongkat Mayoret	1	1	-	Alat Musik Marching Band
118.	Senar	6	6		Alat Musik Marching Band
119.	Euphonium	2	2		Alat Musik Marching Band
	JUMLAH	931	765 (Baik)	166 (Rusak)	

3. Anggaran

Untuk program dan kegiatan serta anggaran Satpol PP dan Damkar pada tahun 2023 terdiri dari 3 program, 9 kegiatan, dan 22 sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.1
Anggaran Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

No	Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Anggaran
1	2		3	4	5
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				8.226.928.782
1.	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase perencanaan, pengangan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		11.999.544
	1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		4 dokumen	5.999.772
	2.	Evaluasi kinerja perangkat daerah		6 laporan	5.999.772
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah		6.776.890.942
	3.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		48 orang	6.766.555.914
	4.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD		5 dokumen	10.335.028
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah		499.333.496
	5.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.020.620

1	2		3	4	5
	6.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	123.967.543
	7.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	11 paket	8.103.000
	8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 paket	3.262.333
	9.	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	1 paket	10.000.000
	10.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan	348.980.000
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		131.000.000
	11.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	30 laporan	131.000.000
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		806.704.800

1	2		3	4	5
	12.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	34.410.000
	13.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	35 unit	622.804.800
	14.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 unit	149.490.000
II.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				6.803.374.002
6.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		6.514.127.258
	15.	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	33 kasus	787.439.568
	16.	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	12 kasus	92.560.000

1	2	3	4	5
	17.	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	1 dokumen 690.264.250
	18.	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	11 dokumen 166.212.440
	19.	Peningkatan kapasitas SDM dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak azasi manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	173 orang 4.777.651.000
7.	Kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada	189.265.915
	20.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	12 laporan 57.545.281

1	2		3	4	5
	21.	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dapat ditangani sesuai SOP	12 laporan	131.720.635
8.	Pembinaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		99.980.828
	22.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan	4 laporan	99.980.828
III.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				532.011.202
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota		Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran		532.011.202
	23.	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan / penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota setiap tahunnya	6 dokumen	235.254.762
	24.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	12 laporan	296.756.440
	Jumlah				15.561.313.986

H. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Telah dilaksanakan pendampingan Implementasi SAKIP SKPD Tahun 2023 pada tanggal 24 Agustus 2023 menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan, Irban III Bersama Tim, Kabag Organisasi Bersama Tim, Bappeda, SKPD Satpol PP dan Damkar dengan nilai SAKIP tahun 2022 yang diperoleh adalah mencapai 68,95% dengan kategori B serta Tindak Lanjut Asistensi Pohon Kinerja, Laporan Kinerja (LKj) dan TLHE SAKIP SKPD yang dilaksanakan di Banjarmasin pada tanggal 24-27 Januari 2024.

Adapun yang perlu ditindaklanjuti adalah:

1. Data dukung / cros cading, perencanaan kinerja (Renstra), tujuan dan sasaran harus diselaraskan dengan PK, LKj, Renja, TC-28
2. Pengumpulan data kinerja berdasarkan SOP dari bawahan ke atasan, (revisi SOP) sesuai dengan monev selanjutnya dibuatkan rencana aksi.
3. Pelaporan kinerja berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
4. Dibuat rekomendasi hasil tindak lanjut dari sakuntala
5. Target disesuaikan harus 100% setiap tahun
6. Evaluasi / monev dibuat secara berkala, matrik evaluasi per triwulan
7. Pengukuran kinerja dibuat berdasarkan laporan kegiatan bukan realisasi keuangan
8. Isu strategis diganti dengan SPM Satpol PP dan Damkar
9. Dibuat analisis eselon II beserta indikator dan anggarannya
10. Semua indikator dalam LKj dijelaskan baik eselon II, III dan IV
11. Efisiensi capaian kinerja Tahun 2023
12. Rencana Aksi Tahun 2023

Kemudian untuk hasil tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 1.3.2
Hasil Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

No	Hasil Tindak Lanjut	Cara Menindaklanjuti
1.	Sudah dilaksanakan penyelarasan cros cading, Renstra, PK, LKj, dan Renja	Penyelarasan antara cros cading, Renstra, PK, Lkj, Renja sesuai dengan arahan dai Irban III Inspektorat

2.	Sudah dilaksanakan berdasarkan SOP pengumpulan data kinerja dari bawahan ke atasan serta revisi rencana aksi	Revisi penyusunan SOP pengumpulan data kinerja dari bawahan ke atasan serta revisi rencana aksi sesuai dengan arahan dari Irban III Inspektorat
3.	Sudah dilaksanakan rapat monev per tiga bulan sekali dengan para kabi, kasi dan kasubbag	Membuat undangan, notulen rapat, daftar hadir, dokumentasi dan tindak lanjut hasil rapat triwulan
4.	Sudah dilaksanakan hasil rekomendasi	Dibuat rekomendasi hasil tindak lanjut dari sakuntala
5.	Sudah dilaksanakan target disesuaikan harus 100% setiap tahun	Revisi penyusunan laporan menjadi 100%
6.	Sudah dilaksanakan rapat monev per tiga bulan sekali dengan para kabi, kasi dan kasubbag	Membuat undangan, notulen rapat, daftar hadir, dokumentasi dan tindak lanjut hasil rapat triwulan
7.	Sudah dilaksanakan untuk melaksanakan pengukuran kinerja dibuat berdasarkan laporan kegiatan	Masing-masing bidang membuat laporan kegiatan setiap tahun untuk mengukur kinerja dan menyampaikan ke perencanaan
8.	Sudah dilaksanakan isu strategis diganti dengan SPM Satpol PP dan Damkar	Disesuaikan dengan SPM Satpol PP dan Damkar sebagai pelayanan dasar dan pengampu SKPD
9.	Sudah dilaksanakan penyampaian analisis eselon II beserta indikator dan anggarannya	Disesuaikan berdasarkan arahan dari Inspektorat dan Bagian Organisasi terkait penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
10.	Sudah dilaksanakan semua indikator dalam LKj dijelaskan baik eselon II, III dan IV	Disesuaikan berdasarkan arahan dari Inspektorat dan Bagian Organisasi terkait penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
11.	Sudah dilaksanakan revisi efisiensi capaian kinerja Tahun 2023	Disesuaikan berdasarkan arahan dari Inspektorat dan Bagian Organisasi terkait penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
12.	Sudah dilaksanakan revisi Rencana Aksi Tahun 2023	Disesuaikan berdasarkan arahan dari Inspektorat dan Bagian Organisasi terkait penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

I. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Cascading Kinerja, Proses Bisnis, Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi, Isu Strategis Perangkat Daerah, Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran, Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya, Sistematika Penyajian

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kerja

Bab ini menguraikan tentang Visi RPJMD, Misi RPJMD, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kinerja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan tentang akuntabilitas kinerja organisasi yang terdiri dari Sasaran RPJMD, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, sedangkan untuk akuntabilitas keuangan yang terdiri dari anggaran dan realisasi APBD 2023, anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program serta perbandingan program dan kegiatan tahun 2022 dan 2023

BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan strategis peningkatan kerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja 2023
4. Cascading / Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, sesuai dengan yaitu “Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi”: Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi.

B. Misi RPJMD

Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ada 5 (lima) yaitu:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergisitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam hal ini mengampu misi ke-3 dan ke-5.

C. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang dihasilkan selama periode tahun 2018-2023 sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

1. Terwujudnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

2. Sasaran

Dari visi, misi dan mengacu pada tujuan tersebut diatas maka sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

3. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka indikator kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Persentase penuntasan pelanggaran Perda dan Perkada
2. Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum
3. Persentase penanganan kebakaran pemukiman

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat di lihat pada Tabel 2.3.1 di bawah ini:

Tabel 2.3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%	100%	100%	90%	55%

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Indikator Kinerja Utama

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	TARGET
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran Perda/Perkada	$\frac{\sum \text{Pelanggaran Perda / Perkada yang diselesaikan}}{\sum \text{Pelanggaran Perda / Perkada yang dilaporkan}} \times 100\%$	100%
	Persentase penyelesaian gangguan dan ketentraman dan ketertiban umum	$\frac{\sum \text{Gangguan tibumtranmas Yang diselesaikan}}{\sum \text{Gangguan tibumtranmas Yang dilaporkan}} \times 100\%$	100%
	Persentase penanganan kebakaran pemukiman	$\frac{\sum \text{Kebakaran pemukiman yang ditangani}}{\sum \text{Kebakaran pemukiman yang dilaporkan}} \times 100\%$	100%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian / Penetapan kinerja adalah dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat pemangku kegiatan. Penetapan Kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tabel Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Eselon II (KEPALA SATUAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran Perda / Perkada	100%
		Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%
		Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%

Eselon III (SEKRETARIS)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian	100%
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang tersusun	100%
		Persentase laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%
		Nilai SAKIP	82

Eselon III (KABID PENEGAKAN PERDA)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penegakan perda dan perkara terkait ketertiban umum	Persentase Jumlah Penegakan perda dan perkara terkait ketertiban umum	100%

Eselon III (KABID KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan, ketentraman, ketertiban umum	Persentase Jumlah penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%

Eselon III (KABID APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan Penegakan Perda	Persentase jumlah SDA Satlinmas yang memiliki Sertifikat pengembangan Satlinmas	85%
		Persentase jumlah SDA yang mengikuti diklat pengembangan aparatur	90%

Eselon III (PEMADAM KEBAKARAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase Jumlah kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana damkar sesuai standar	55%
		Persentase Jumlah anggota damkar yang berkualitas	90%

Eselon IV (KASUBBAG PERENCANAAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	4 Dokumen
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	6 Laporan

Eselon IV (KASUBBAG KEUANGAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan penyusunan dokumen laporan keuangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48 Orang/Bulan
		Dokumen penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	5 Dokumen

Eselon III (KABID APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan Penegakan Perda	Persentase jumlah SDA Satlinmas yang memiliki Sertifikat pengembangan Satlinmas	85%
		Persentase jumlah SDA yang mengikuti diklat pengembangan aparatur	90%

Eselon III (PEMADAM KEBAKARAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana damkar sesuai standar	55%
		Persentase anggota damkar yang berkualitas	90%

Eselon IV (KASUBBAG PERENCANAAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	4 Dokumen
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	6 Laporan

Eselon IV (KASUBBAG KEUANGAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan penyusunan dokumen laporan keuangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48 Orang/Bulan
		Dokumen penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	5 Dokumen

Eselon IV (KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pemenuhan dan pemeliharaan aset kantor	Jumlah aset perkantoran yang terpe- nuhi dan dipelihara	22 jenis
2.	Melaksanakan administrasi perkantoran dan kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan kepegawaian	1 dokumen

Eselon IV (KASI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menyelesaikan pelanggaran perda / perkara terkait keamanan dan ketertiban umum	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati yang dapat ditangani sesuai SOP	12 Laporan

Eselon IV (KASI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Perda dan Perkada	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan
		Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegak perda dan perkara	4 Laporan

Eselon IV (KASI PENGENDALIAN DAN PENINDAKAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan patroli / penertiban dan razia keamanan lingkungan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada	10 Kasus

Eselon IV (KASI PENGAMANAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pengamanan kegiatan pemerintah daerah dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertibam umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan, dan pengawalan	33 Kasus

Eselon IV (KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pelatihan SDA Satlinmas	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	11 Dokumen

Eselon IV (KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pembinaan kompetensi SDA Satpol PP dan Damkar	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	173 orang

Eselon IV (KASI KESIAPSIAGAAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/ penanggulangan kebakaran dalam daerah	6 Dokumen

Eselon IV (KASI KEDARURATAN)

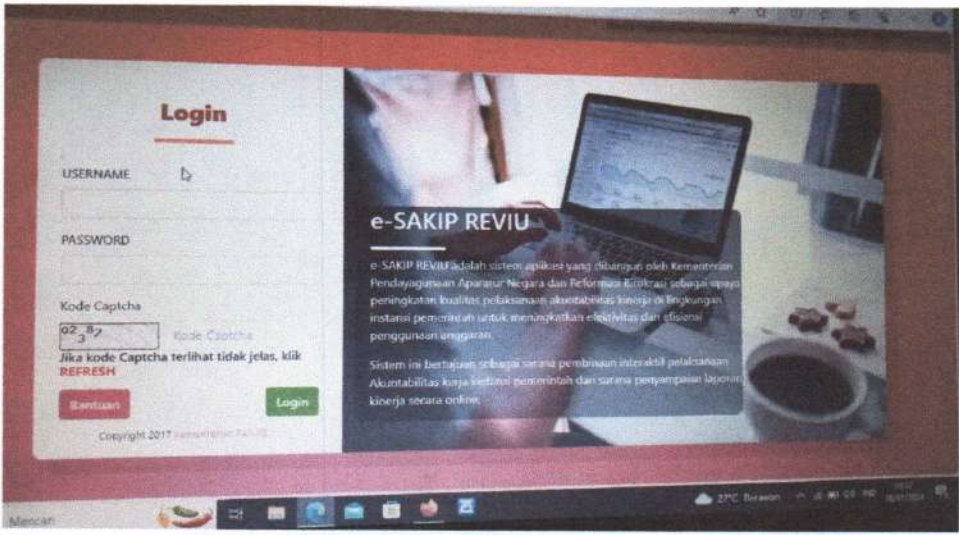
NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan penanganan kebakaran	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1152 Laporan

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Adapun Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Satpol PP dan Damkar pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan perencanaan, laporan kinerja, monitoring dan evaluasi
2. Pembentukan Sekretariat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
3. Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
4. Penetapan Petugas Tindak Internal (PTI)
5. Tim Responsif Cepat

Tabel 2.3.3
Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

No	Uraian / Data Dukung
1.	Penerapan Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) 

No	Uraian / Data Dukung
2.	Pembentukan Sekretariat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
3.	SK Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) 

No	Uraian / Data Dukung
4.	Penetapan Petugas Tindak Internal (PTI) 
5.	Tim Responsif Cepat 

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi.

Dalam pembuatan pertanggungjawaban terhadap jalannya manajemen organisasi perlu dilakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya sehingga akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program. Pengukuran kinerja meliputi capaian kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan.

1. Sasaran RPJMD

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundangan lainnya, mengembangkan sumber daya aparatur serta perlindungan kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini mendukung pencapaian Sasaran RPJMD yang terkait dengan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum. Dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan salah satu komponen SKPD yang melaksanakan Sasaran pada misi ke-3 dan ke-5 RPJMD yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Tabel Sasaran RPJMD, Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023
1.	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran Perda / Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian gangguan dan ketentraman setra kebakaran pemukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Eselon II

Berdasarkan jabatan tertinggi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Eselon II yaitu Kepala Satuan dengan Pangkat Pembina Utama Muda (IV.c). Dimana sasaran strategis Eselon II terdiri dari:

2.1 Kepala Satuan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Sasaran : Meningkatkan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

2. Indikator 1 : Persentase penuntasan pelanggaran Perda dan Perkada

Perbandingan antara pelanggaran tahun 2022 lebih berkurang masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda / Perkada sebanyak 102 kasus terdiri dari Perkara Sanksi Syariah sebanyak 8 kasus, Perkara Tipiring Miras sebanyak 3 kasus, Perkara Tipiring LPG sebanyak 3 kasus, serta pernyataan jam operasional warung malam (tempat hiburan, mempekerjakan anak di bawah umur, pengamen, hotel / kost) sebanyak 88 kasus, di laporkan serta ditangani selesai sebanyak 102 kasus.

Sedangkan untuk pelanggaran tahun 2023 bertambah menjadi 128 kasus terdiri dari Perkara Sanksi Syariah sebanyak 74 kasus, Perkara Tipiring Miras sebanyak 27 kasus, Surat Pernyataan warung malam (tempat hiburan, mempekerjakan anak di bawah umur, pengamen, hotel / kost) sebanyak 27 kasus, dilaporkan serta ditangani selesai sebanyak 128 kasus.

Dengan meningkatnya kembali pelanggaran terhadap Perda / Perkada maka perlu ditingkatkan Kembali melalui sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda / Perkada dan penanganan atas pelanggaran Perda / Perkada.

3. Indikator 2 : Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Pelanggaran yang sudah dilaporkan dan ditangani selesai sebanyak 128 kasus selanjutnya akan diberikan pembinaan dan penyuluhan terkait terhadap pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan, dan pengawalan.

Di tahun 2023 ini dalam rangka penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum untuk sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa di lapangan berupa razia-razia terhadap warung-warung yang mempekerjakan anak di bawah umur, para gelandangan / gepeng yang terindikasi mengganggu ketentraman masyarakat, para pemuda yang di duga mengkonsumsi miras / obat-obatan terlarang adanya demo dan unjuk rasa yang terstruktur dan pelayanan-pelayanan insidentil lainnya.

4. Indikator 3 : Persentase penanganan kebakaran pemukiman

Pada tahun 2023 masing-masing kecamatan di lengkapi dengan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan sebanyak 6 pos sektor

damkar yaitu pos sektor Kintap, Takisung, Kurau, Panyipatan, Jorong, Bati-Bati sedangkan yang masih belum ada pos sektor damkar berjumlah 11 pos sektor.

Untuk tahun 2022 telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan sebanyak 58 orang terdiri dari 7 orang ASN dan 51 orang PTT. Sedangkan untuk tahun 2023 sebanyak 1 orang yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur.

Tahun 2023 jumlah aparatur pemadam kebakaran yang telah memenuhi standar kualifikasi pemadam kebakaran sebanyak 12 orang sedangkan jumlah sarana dan prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi sebanyak tahun 2023 sebanyak 209 jenis.

Pada tahun 2023 jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran sebanyak 309 kejadian dilaporkan dan ditangani selesai sebanyak 309 tingkat kejadian. Adapun sesuai dengan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota dengan waktu tanggap seluruh kejadian sebanyak 25.983 menit /309 kejadian sehingga hasil respon terdapat 84 menit / kejadian.

Upaya yang dilakukan terkait kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pemadam Kebakaran adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral
2. Melakukan sosialisasi edukasi
3. Inovasi membuka layanan call center baik gangguan trantibum maupun pemadam kebakaran
4. Meningkatkan peran tim respon time dalam hal penanganan pemadaman kebakaran dan penyelamatan/evakuasi

Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Adanya mutasi dan promosi jabatan menyebabkan terkendalanya komunikasi dan koordinasi lintas sektoral
2. Kemampuan SDM yang terlibat tidak mempunyai keahlian khusus dalam hal berkomunikasi

3. Tidak maksimalnya masyarakat menggunakan media pelayanan pengaduan yang telah disediakan baik media online maupun offline
4. Belum terisinya pos damkar pada semua Kecamatan yang menyebabkan masih belum maksimalnya tim respon time bekerja



Tabel.3.2.1.1
Anggaran dan Realisasi Tahun 2023

No	Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6	7
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				8.226.928.782		
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		11.999.544	11.145.800	92.88
	1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		4 dok	5.999.772	5.9952.400	99.41
	2.	Evaluasi kinerja perangkat daerah		6 laporan	5.999.772	5.193.400	86.56
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah		6.776.890.942	6.002.399.549	88.57
	3.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		48orang	6.766.555.914	5.997.032.349	88.63
	4.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD		5 dok	10.335.028	5.357.200	51.84
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah		499.333.496	489.787.286	98.08
	5.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.020.620	4.372.130	87.08
	6.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	123.967.543	116.234.246	93.76

1	2		3	4	5	6	7
	7.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	11 paket	8.103.000	7.450.000	91.94
	8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 paket	3.262.333	3.101.400	95.07
	9.	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	1 paket	10.000.000	10.000.000	100
	10.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan	348.980.000	348.629.510	99.90
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		131.000.000	79.202.555	60.46
	11.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	30 laporan	131.000.000	79.202.555	60.46
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		806.704.800	788.944.054	97.79
	12.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	34.410.000	34.065.000	99.00
	13.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	35 unit	622.804.800	619.674.054	99.50

1	2		3	4	5	6	7
	14.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 unit	149.490.000	135.205.000	90.44
II.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				6.803.374.002		
6.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		6.514.127.258	6.199.492.733	95.16
	15.	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	33 kasus	787.439.568	782.005.000	99.31
	16.	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	12 kasus	92.560.000	90.020.000	97.26
	17.	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	1 dokumen	690.264.250	672.893.000	97.48

1	2		3	4	5	6	7
	18.	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	11 dokumen	166.212.440	137.590.856	82.78
	19.	Peningkatan kapasitas SDM dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa hak azasi manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	173 orang	4.777.651.000	4.517.037.877	94.55
7.	Kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		189.265.915	179.955.300	95.08
	20.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	12 laporan	57.545.281	56.885.000	98.85
	21.	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dapat ditangani sesuai SOP	12 laporan	131.720.635	123.070.300	93.43
8.	Pembinaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		99.980.828	89.775.207	89.79

1	2	3	4	5	6	7
	22. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan	4 laporan	99.980.828	89.775.207	89.79
III.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			532.011.202		
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran		532.011.202	480.116.600	90.24
	23. Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan / penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota setiap tahunnya	6 dokumen	235.254.762	184.526.600	78.44
	24. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	12 laporan	296.756.440	295.590.000	99.61
	Jumlah			15.561.313.986	14.320.809.084	92.03

Dilihat pada tabel anggaran dengan realisasi anggaran dalam pemenuhan kinerja Satpol PP dan Damkar tahun 2023 sangat efisiensi karena dalam target tahunan fisiknya sudah mencapai 100% sementara untuk realisasi keuangan mencapai 92,03% sehingga masih ada sisa anggaran/Silva sehat. Artinya keuangan Satpol PP dan Damkar untuk tahun 2023 lebih efisien dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.3.2.1.2
Efisiensi Sasaran Strategis

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	92.03%	7.97%

Analisis penggunaan sumber daya Satpol PP dan Damkar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satpol PP dan Damkar sebanyak 1 orang
2. Sekretariat sebanyak 1 orang
 - Sub Bagian Perencanaan 1 Orang kasubbag
 - Sub Bagian Keuangan 1 Orang kasubbag dan 4 orang staf
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebanyak 1 orang dan 3 orang staf
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah 1 orang kabid
 - Seksi Pembinaan dan Penyuluhan 1 orang kasi
 - Seksi Penyidikan dan Penyelidikan 1 orang kas
4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 orang kabid
 - Seksi Pengendalian dan Penindakan 1 orang kasi dan 6 orang staf
 - Seksi Pengamanan 1 orang kasi dan 8 orang staf
5. Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat 1 orang kabid
 - Seksi Pembinaan dan Pengawasan 1 orang kasi
 - Seksi Perlindungan Masyarakat 1 orang kasi dan 1 orang staf
6. Bidang Pemadam Kebakaran 1 orang kabid
 - Seksi Kesiapsiagaan 1 orang kasi dan 2 orang staf
 - Seksi Kedaruratan 1 orang kasi dan 2 orang staf

Analisis Kendala dan Rencana Aksi Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.3
Rencana Aksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN				KET
			TW.1	TW.2	TW.3	TW.4							TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	
	Meningkatnya penanganan gangguan ketertarikan dan ketertarikan umum	Persentase penuntasan pelanggaran Perda dan Perkada	25%	50%	75%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				8,225,928,782						
		Persentase penyelesaian gangguan ketertarikan dan ketertarikan umum	25%	50%	75%	100%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			11,999,544	Sekretariat					
		Persentase penanganan kebakaran pemukiman	25%	50%	75%	100%	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dok	Menyusun dokumen Renja Mursi dan Perubahan tahun 2023, mengkoordinasikan rincian belanja, menginput dan menginput RKA, menginput RAK, mencetak dokumen DPA dan DPPA	5,999,772		√	√	√	√	
							Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan	Menginput Monev TW.1, 2, 3 dan 4, membuat laporan LKJ, SPM/LPPD	5,999,772		√	√	√	√	
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah			6,776,890,942	Sekretariat					
							Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 orang	Menginput pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	6,766,555,914		√	√	√	√	
							Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	5 dok	Melakukan pembayaran jasa transaksi keuangan, pembelian motor, melakukan kegiatan pengadaan dan penjualan, menginput realisasi keuangan	10,335,028		√	√	√	√	
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah			499,333,496	Sekretariat					
							Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Melakukan pembelian komponen instalasi listrik	5,020,620		√	√	√	√	
							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	Melakukan pembelian peralatan komputer, PC, Scanner, perabotan ATK	123,967,543		√	√	√	√	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	11 paket	Melakukan pembelian catran/alat pembersih	8,103,000		√	√	√	√	
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 paket	Menyiapkan dan melakukan barang cetakan dan penggandaan	3,262,333		√	√	√	√	
							Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	1 paket	Menyiapkan belanja bahan serta melaksanakan kegiatan pameran	10,000,000		-	-	-	√	
							Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan	Menyiapkan dokumen rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	348,980,000		√	√	√	√	
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			131,000,000	Sekretariat					

						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 laporan	Menyiapkan dan melakukan pembayaran rekening listrik, PDAM, Telepon, Internet	131,000,000		V	V	V	V	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			806,704,800	Sekretariat					
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	Menyiapkan dokumen pembayaran pajak, melakukan pemeliharaan mobil	34,410,000		V	V	V	V	
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	35 unit	Menyiapkan dokumen pembayaran pajak, melakukan pemeliharaan mobil	622,804,800		V	V	V	V	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 unit	Menyiapkan dokumen pembayaran kontrak rehab gedung, melakukan pembayaran honorarium konsultan	149,490,000		-	-	-	V	
						Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				6,803,374,002						
						Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada			6,514,127,258	Bidang Trantibum					
						Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	33 kasus	Menyiapkan dokumen pembayaran honorarium patroli, stanbay, dan pengamanan, menyiapkan makan minum kegiatan	787,439,568		V	V	V	V	
						Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	12 kasus	Menyiapkan dokumen pembayaran honorarium kegiatan rizia, menyiapkan makan minum kegiatan	92,560,000		V	V	V	V	
						Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	1 dok	Menyiapkan dokumen pembayaran honorarium pengamanan Pibkades anggota Satpol PP, Linmas, TNI/Polri, menyiapkan makan minum kegiatan	690,264,250		-	-	V	V	
						Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	11 dok	Menyiapkan dokumen kegiatan pelaksanaan pelatihan Satlinmas, melakukan pembayaran uang transport peserta	166,212,440	Bidang SDA	V	V	V	V	
						Peningkatan kapasitas SDM dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa hak azasi manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	173 orang	Menyiapkan dokumen dan melakukan pembayaran gaji anggota SATPOL PP dan Damkar, BPJS dan anggota Korsek, menyediakan suplemen, melakukan test urine	4,777,651,000		V	V	V	V	
						Kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada			189,265,916	Bidang Gakda					

							Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	12 laporan	Melakukan kegiatan sosialisasi dan pengawasan terhadap indikasi pelanggaran Perda / Perkada, mencetak brosur / stiker	57,545,291		√	√	√	√	
							Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dapat ditangani sesuai SOP	12 laporan	Melakukan pembayaran honor tim, pembelian ATK untuk keperluan RAP Pelanggaran Perda/Perkada, menyediakan makan minum rapat dan kegiatan penanganan pelanggaran Perda/Perkada, melakukan pembayaran honorarium tim penegak Perda, melakukan pembayaran honorarium saksi	131,720,635		√	√	√	√	
							Pembinaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada			99,980,828	Bidang Gakda					
							Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan	4 laporan	Melakukan pembayaran kontribusi diklat pembentukan PPNS, pembelian ATK, menyediakan makan minum rapat, melakukan pembayaran honorarium kegiatan pengembangan kapasitas/Karier PPNS, memfasilitasi perjalanan dinas uang harian serta transport peserta Diklat PPNS	99,980,828		-	-	√	√	
							Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				532,011,202						
							Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahays dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran			532,011,202	Bidang Damkar					
							Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan / penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota setiap tahunnya	6 dok	Menyiapkan dokumen pengadaan alat damkar, melakukan pengadaan dan penjilidan, pemeliharaan mesin	235,254,762		√	√	√	√	
							Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	12 laporan	Menyiapkan penganggunaan dan penjilidan, melakukan pembayaran honorarium anggota Damkar, melakukan pembayaran honorarium Bupati/Wakil Bupati	296,756,440		√	√	√	√	
							Jumlah				15,561,313,986						

3. Eselon III

Berdasarkan Jabatan Eselon III yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah adalah sebagai berikut:

3.1 Sekretaris

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian	100%	100%	100%	100%
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang tersusun	100%	100%	100%	100%
		Persentase laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP	81%	70.6%	70.02%	68.95%

1. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

Perbandingan capaian target tahun 2022 adalah sebesar 81% sedangkan nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 70.6%. Untuk target akhir renstra tahun 2023 sebesar 70.02% namun untuk nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 68.95% dengan kategori baik (B)

2. Indikator 1 : Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian

Kegiatan kesekretariatan yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah menangani kegiatan pengarsipan surat masuk-keluar, pemeliharaan asset, kenaikan pangkat, pemeliharaan perkantoran meliputi pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dengan realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan 98,08, pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar 60,46, Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah ditargetkan realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar 99,79%.

3. Indikator 2 : Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang tersusun

Kegiatan kesekretariatan yang meliputi Sub Bagian Perencanaan menangani kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), DPA, RKA, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja (LKj), Laporan LKPJ / LPPD, Laporan SPM guna pemenuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar 92,88%

4. Indikator 3 : Persentase laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan

Kegiatan kesekretariatan yang meliputi Sub bagian Keuangan menangani kegiatan yang berhubungan dengan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan tahunan, laporan pertanggung jawaban keuangan/realisasi laporan kinerja, catatan atas laporan keuangan (CALK) dengan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah dengan realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar 88,62%

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

- 1) Untuk bidang Sekretariat terdiri dari 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 3 Kasubbag yaitu Kasubbag Kepegawaian dengan Staf sebanyak 1 orang PNS, 6 orang Non PNS, untuk Kasubbag Perencanaan

dengan Staf sebanyak 2 orang non PNS, Kasubbag Keuangan dengan Staf sebanyak 2 orang PNS, 2 orang Non PNS

Analisis kendala yang dihadapi oleh bidang kesekretariatan adalah sebagai berikut:

- Pergantian pejabat karena adanya mutasi atau promosi yang begitu cepat sehingga menjadi kendala dalam penyelesaian pekerjaan
- Penempatan pejabat yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak bersesuaian dengan bidang tugas menjadi tanggung jawabnya Regulasi yang sering berubah / berganti juga salah satu kendala, karena penyesuaian kendali terhadap aturan / kebijakan baru
- Pada realisasi anggaran untuk tahun 2023 ini mencapai 92,03%, tidak bisa sepenuhnya direalisasikan karena ada perbedaan pengusulan SSH, SSB dengan sehingga pagu nya mengalami silfa

Analisi rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh bidang kesekretariatan untuk kemajuan SKPD adalah sebagai berikut:

- Penempatan pejabat sebagian melihat dari kemampuan dan latar belakang pendidikan yang bersesuaian sehingga mampu untuk bekerja dan berkomunikasi menjadi lebih baik
- Adanya peraturan regulasi yang saling berhubungan/sinergi di buat lebih mudah dan bisa dipakai oleh pengguna lainnya
- Sebelum membuat pra RKA para PPTK harus merumuskan terlebih dahulu kegiatan yang akan dilaksanakan, melaksanakan survey harga pasar bagi pembelian barang, menganggarkan pajak pembelian sehingga bisa menyesuaikan SSH nya.

3.2 Kepala Bidang Penegakan Perda

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pe negakan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum	Persentase penuntasan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum	100%	100%	100%	100%

1. **Sasaran** : **Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum**

2. **Indikator** : **Persentase penuntasan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum**

Untuk bidang Penegakan Perda (Gakda) terdiri dari 1 (satu) orang Kabid Gakda yang membawahi 2 orang Kasi, 2 orang Staf, 2 orang Non PNS

Perbandingan antara kegiatan tahun 2022 sebesar 102 kasus dilaporkan dengan tahun 2023 meningkat masyarakatnya yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada sebanyak 128 kasus terdiri dari Perkara Sanksi Syariah sebanyak 74 kasus, Perkara Tipiring Miras sebanyak 27 kasus, Surat Pernyataan warung malam (tempat hiburan, mempekerjakan anak di bawah umur, pengamen, hotel/kost) sebanyak 27 kasus, dilaporkan serta ditangani selesai sebanyak 128 kasus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Data pelanggaran yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada selama Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Berkas perkara sanki syariah	74 kasus	

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
2.	Berkas perkara tipiring miras	27 kasus	

Peraturan Bupati/Walikota dengan realisasi fisik 100% realisasi keuangan 93,43%

Adapun Anggaran dan Realisasi Bidang Penegakan Perda (Gakda) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel.3.2.2
Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Efisiensi Sasaran Strategis

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	189.265.916	179.955.300	95,08
Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati / walikota	57.545.281	56.885.000	98,85
Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota	131.720.635	123.070.300	93,43

Tabel.3.2.3
Efisiensi Sasaran Strategis

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	95.08%	4.92%

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota serta penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota adalah:

- Masih tingginya angka pelanggaran Perda/Perkada di Kabupaten Tanah Laut

- Kurangnya Sumber Daya Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Sarana dan prasarana yang belum memadai dan mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran Perda/Perkada tersebut
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan akan Perda/Perkada tersebut

Sedangkan upaya untuk mengatasi permasalahan dalam melaksanakan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota serta penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota adalah:

- Dengan melaksanakan kegiatan yang lebih efektif dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku
- Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur (SDA) dalam Diklat Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Untuk tahun 2023 sudah 2 (dua) orang yang melaksanakan Diklat Penyidik PPNS.
- Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
- Perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan Perda/Perkada kepada masyarakat

3.3 Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan ketentraman, ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ke tentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%

1. Sasaran : Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan ketentraman, ketertiban umum

2. Indikator : Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Pada tahun 2023 dalam rangka penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum untuk kegiatan pengendalian dan penindakan dilapangan berupa razia-razia terhadap warung-warung yang mempekerjakan anak di bawah umur, para gelandangan / gepeng yang terindikasi mengganggu ketentraman masyarakat, para pemuda yang diduga mengkonsumsi miras / obat-obatan terlarang. Adanya demo / unjuk rasa yang terstruktur dan pelayanan-pelayanan insidentil lainnya.

Untuk bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) terdiri dari 1 (satu) Kabid Trantibum yang membawahi 2 orang Kasi 13 orang Staf, 3 orang Non PNS

Tabel 3.3.1

Data Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Kegiatan Pengendalian dan Penindakan selama Tahun 2023

No	Kegiatan	Tempat
1.	Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum untuk kegiatan pengendalian dan penindakan dilapangan berupa razia-razia terhadap warung-warung yang mempekerja kan anak di bawah umur, para gelandangan/gepeng yang terindikasi meng ganggu ketentraman masyarakat, para pe muda yang diduga mengkonsumsi miras / obat-obatan terlarang	1. Razia terhadap warung malam, warung yang mempekerjakan anak di bawah umur 

No	Kegiatan	Tempat
		2. Razia para gelandangan/gepeng yang terindikasi menggu ketentraman masyarakat 
		3. Razia para pemuda yang mengkonsumsi miras/obat-obatan terlarang 

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan,

dan pengawalan realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar 99%, untuk Sub Kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan realisasi fisik 100% realisasi keuangan 97,26%, untuk Sub Kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota dengan realisasi fisik 100% realisasi keuangan

Adapun untuk anggaran dan realisasi bidang ketentraman dan ketertiban umum tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel.3.3.2
Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Efisiensi Sasaran Strategis

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1.570.263.818	1.544.864.000	98,38
Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	787.439.568	782.005.000	99.31
Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	92.560.000	90.020.000	97.26
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota	690.264.250	672.839.000	97.48

Tabel.3.3.3
Efisiensi Sasaran Strategis

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	98.38%	1.62%

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah:

- Kurangnya edukasi dan kesadaran kepada masyarakat seperti yang mempekerjakan anak di bawah umur
- Sering ditemui adanya back up dari pihak ketiga yang meleagalkan kegiatan
- Tidak jarang timbul perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Sedangkan upaya mengatasi masalah yaitu dengan cara:

- Meningkatkan patroli / razia di tempat-tempat yang diduga menjadi sumber kerawanan
- Membuka layanan online (reaksi cepat) yang gampang dan mudah diakses oleh masyarakat
- Melaksanakan sosialisasi pada setiap pertemuan, rapat, dan kegiatan lainnya

3.4 Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Damkar sesuai standar	75%	75%	55%	55%	100%
		Persentase Anggota damkar yang berkualitas	90%	90%	90%	90%	100%
	Rata-rata capaian kinerja tahun 2023						100%

1. Sasaran : Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

2. Indikator : Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Damkar sesuai standar

Pada Tahun 2023 masing-masing kecamatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan sebanyak 6 (enam) pos sektor Damkar. Sedangkan yang masih belum ada pos sektor damkar berjumlah 11 pos sektor.

Tabel 3.4.1
6 (enam) Pos Sektor Kecamatan Yang Dilengkapi Sarana dan Prasarana Damkar

No	Pos Sektor	Keterangan
1.	Pos Sektor Kintap	
2.	Pos Sektor Takisung	
3.	Pos Sektor Kurau	

4.	Pos Sektor Panyipatan	
5.	Pos Sektor Jorong	
6.	Pos Sektor Bati-Bati	

Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran

Tahun 2023 telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas aparaturnya hanya 1 orang yaitu An. Sulasi Nordiansyah

Untuk bidang Damkar terdiri dari 1 (satu) Kabid Damkar yang membawahi 2 orang Kasi 4 orang Staf, 1 orang Non PNS

Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui Sub Kegiatan pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar 78%, untuk Sub Kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota dengan realisasi fisik 100% realisasi keuangan 99,61%

Adapun untuk anggaran dan realisasi bidang Pemadam Kebakaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel.3.4.2
Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Efisiensi Sasaran Strategis

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	532.011.202	480.116.600	90,24
Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	235.254.762	184.526.600	78.44
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	296.756.440	295.590.000	99.61

Tabel.3.4.3
Efisiensi Sasaran Strategis

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	90.24%	9.76%

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yaitu:

- Masih kurangnya anggota Damkar memiliki keahlian Pemadam I
- Ketersediaan tenaga Pemadam Kebakaran yang dirasa masih kurang
- Pengisian Pos Sektor dan penunjang peralatan yang masih belum lengkap
- Terkendalanya penyediaan sumber air disaat kemarau panjang

Sedangkan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

- Mengikutsertakan anggota Damkar untuk keahlian Pemadam I pada tahun 2024
- Karena adanya pemutusan hubungan kontrak terhadap salah satu anggota Damkar sehingga perlu mengaktifkan para relawan yang ada dikuatkan dengan SK Bupati Tanah Laut
- Secara bertahap sudah dialokasikan pada anggaran tahun 2024 baik penambahan alat maupun peningkatan kapasitas.
- Menambah baru potensi sumur bor yang diperkirakan cukup pada saat kemarau Panjang.

Analisis kendala setelah dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Lembaga yang menyelenggarakan Diklat dianggap tidak memenuhi syarat yang dikehendaki Damkar
- BKSDA hanya resque terhadap evakuasi hewan liar
- Pengetahuan ilmu Diklat hanya sebatas evakuasi dan hewan liar sedangkan ilmu bidang pemadam nya kurang

Analisis rencana aksi setelah dilaksanakannya kegiatan Diklat Damkar adalah sebagai berikut:

- Lembaga / balai yang melaksanakan Diklat harus lebih komprehensif
- Pembelajaran lebih mengutamakan tentang pemadaman kebakaran
- Untuk tahun selanjutnya harus dianggarkan kembali, anggaran pendidikan dan pelatihan Damkar untuk menindaklanjuti sisa anggota yang belum mengikuti diklat tersebut.

3.5 Kepala Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan Penegakan Perda	Persentase SDA Satlinmas yang memiliki sertifikat	100%	100%	90%	90%	100%

	Persentase Jumlah SDA Satpol PP yang mengikuti diklat	100%	23%	100%	100%	100%
	Rata-rata capaian kinerja tahun 2023					100%

Untuk bidang aparatur dan perlindungan masyarakat terdiri dari 1 (satu) orang Kabid SDA yang membawahi 2 orang Kasi, 3 orang Staf, 3 orang Non PNS

Bidang aparatur dan perlindungan masyarakat melaksanakan kegiatan pelatihan Satlinmas di semua desa dari 11 Kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3.5.1
Jumlah Satlinmas yang dikukuhkan sebanyak 1.875 orang

Kecamatan	Desa	Jumlah Peserta
Pelaihari	20	440
Bajuin	9	118
Tambang Ulang	9	104
Kurau	11	96
Bumi Makmur	11	121
Bati-bati	14	201
Takisung	12	149
Panyipatan	10	130
Batu Ampar	14	201
Jorong	11	135
Kintap	14	180
Jumlah	135	1875

Sumber data : Bidang Sumberdaya Aparatur

Tabel 3.5.2

Peningkatan Sumber Daya Aparatur serta Pelatihan Satlinmas

No	Wilayah	Keterangan
1.	Melaksanakan pembinaan pada satlinmas desa telaga di Kec. Pelaihari acara manunggal tuntung pandang Tanggal 17 Mei 2023	
2.	Pelatihan linmas desa dalam rangka Peningkatan sumber daya aparaturnya Kecamatan Bajuin tanggal 25 Mei 2023	
3.	Sosialisasi Penanganan kebakaran oleh bidang damkar pada acara manunggal tuntung pandang di Desa ranggang Kecamatan Takisung	
4.	Pelatihan LINMAS Desa dalam rangka peningkatan sumber daya Aparatur Desa di kec. Bajuin Tanggal 25 Mei 2023	

5.	Kasi Daldak, Kasi Linmas + Staf beserta staf Bidang Gakda menghadiri kegiatan Manunggal Tuntung Pandang di Desa Ambungan Dusun Jayau Kec. Pelahari	
6.	Pelatihan Linmas Desa se Kecamatan Panyipatan dalam rangka Peningkatan sumber daya aparatur desa tanggal 08 Juni 2023	
7.	Pelatihan Linmas Desa Se Kecamatan Jorong dalam rangka Peningkatan sumber daya aparatur desa Tanggal 06 Juli 2023	

Analisis kendala setelah dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk penganggaran yang kurang menyebabkan tidak semua anggota dapat mengikuti
- Waktu pelaksanaan dirasa terlalu singkat
- Terkadang terkendala cuaca karena kegiatannya dilaksanakan di desa
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan

Analisis reaksi aksi setelah di laksanakan kegiatan pelatihan bagi anggota Satlinmas

- Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
- Memberikan waktu dan ruang yang cukup sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik
- Untuk kegiatan sebaiknya dimasukan dalam anggaran murni SKPD
- Harus menyesuaikan cuaca
- Adanya dukungan dari pimpinan terkait sarana dan prasarana

Adapun untuk anggaran dan realisasi bidang Sumber Daya Aparatur (SDA) tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel.3.5.3
Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Efisiensi Sasaran Strategis

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4.943.863.440	4.654.628.733	94,14
Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	166.212.440	137.590.856	82.78
Peningkatan kapasitas SDM dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak azasi manusia	4.777.651.000	4.517.037.877	94.55

Tabel.3.5.4
Efisiensi Sasaran Strategis

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	94.14%	5.86%

4. Eselon IV

Berdasarkan Jabatan Eselon IV yang ada di Satpol PP tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 8 (delapan) orang Kepala Seksi sebagai berikut:

4.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1.	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	3 laporan	6 laporan	6 laporan	100%
	Rata-rata capaian kinerja tahun 2023						100%

1. Sasaran : Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sasaran Sub Bagian Perencanaan yaitu terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target perencanaan 4 dokumen dan realisasi belanja 4 dokumen, dan juga laporan evaluasi kinerja dengan target 6 laporan dapat direalisasikan 6 laporan juga sehingga sudah dilaksanakan 100%. Dimana dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun sekali masa jabatan Bupati Tanah Laut sesuai kebutuhan SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan target dan capaian lima tahunan.

Untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) disusun setiap setahun sekali sebelum melaksanakan kegiatan, SKPD dituntut untuk membuat

rencana awal kebutuhan belanja selama 1 tahunan. Yang disampaikan ke Bappeda kemudian di verifikasi, di bahas oleh DPRD dan Tim Anggaran. Setelah disetujui dibukukan menjadi sebuah dokumen yaitu RKA dan DPA, yang mana dokumen tersebut sebagai acuan SKPD dalam melaksanakan kegiatan.

Setelah selesai RKA dan DPA SKPD maka semua Pejabat baik Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang terarah dan terukur.

2. Indikator 1 : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah

Indikator jumlah dokumen perencanaan yaitu sebanyak 6 dokumen terdiri dari Laporan Kinerja (LKj), Laporan LKPJ, Laporan LPPD, Laporan SPM dan laporan monev, Laporan Risk Register, dengan realisasi fisik 6 dokumen sehingga dilaksanakan 100%.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.5.999.772,- dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp.5.999.772,- dengan total anggaran sebesar Rp.11.999.544,- dimana realisasi sebesar Rp.11.145.800,- atau 92,88%.

Tabel.4.1.1
Efisiensi Sasaran Strategis

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	92.88%	7.12%

4.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1.	Melaksanakan penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	48 org/bulan	48 org/bulan	100%
		Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	20 dokumen	20 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%
	Rata-rata capaian kinerja tahun 2023						100%

1. Sasaran : Melaksanakan Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

Sasaran yang ada di Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan penyusunan dokumen laporan keuangan menangani kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan tahunan, laporan pertanggung jawaban keuangan/realisasi laporan kinerja, catatan atas laporan keuangan (CALK) dengan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah dimana realisasi fisik sudah dilaksanakan 100%.

2. Indikator 1 : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

Indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN adalah dengan target 48 orang/bulan yang menerima gaji untuk ASN Satpol PP dan Damkar dan direalisasikan sebanyak 48 orang/bulan karena tidak ada yang pindah atau keluar. Untuk tahun 2023 ini telah mengalami mutasi jabatan tetapi tetap diganti dengan pejabat yang baru sehingga tetap 100%.

3. Indikator 2 : Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

Indikator dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD ditargetkan 5 dokumen dan direalisasikan juga 5 dokumen sehingga capaian telah dilaksanakan 100%. Adpaun laporan yang sudah disampaikan kepada BPKAD adalah laporan bulanan setiap bulan disampaikan, laporan triwulan disampaikan pada 3 bulan sekali, untuk laporan semesteran disampaikan setiap 6 bulan sekali, sedangkan untuk laporan tahunan disampaikan setiap 1 sekali. Kemudian ada lagi yang terkait dengan catatan atas laporan keuangan (CALK) itu disampaikan setiap tahun berakhirnya kegiatan dalam 1 tahunan. CALK merupakan laporan pertanggung jawaban kegiatan SKPD yang sudah dilaksanakan selama satu tahun berjalan.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.6.766.555.914,- dan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebesar Rp.10.335.028,- sehingga total anggaran sebesar Rp.6.776.890.942,- dimana realisasi sebesar Rp.6.002.399.549,- atau 88.57%

Tabel.4.2.1
Efisiensi Sasaran Strategis

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	88.57%	11.43%

4.3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1.	Melaksanakan pemenuhan dan pemeliharaan aset kantor	Jumlah aset perkantoran yang terpenuhi dan dipelihara	22 Jenis	22 Jenis	22 Jenis	22 Jenis	100%

2.	Melaksanakan administrasi perkantoran dan kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Rata-rata capaian kinerja tahun 2023						100%

1. Sasaran : Melaksanakan Pemenuhan dan Pemeliharaan Aset Kantor

Sasaran yang di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan pemenuhan dan pemeliharaan aset kantor yaitu menangani kegiatan pemeliharaan seluruh aset Satpol PP dan Damkar baik di Kantor maupun di Posko Sektor Kecamatan-kecamatan yang memiliki aset Damkar. Sedangkan sasaran dalam melaksanakan administrasi perkantoran dan kepegawaian yaitu menangani pengarsipan surat masuk-keluar, kenaikan pangkat, dan kepegawaian/seluruh ASN Satpol PP dan Damkar dengan realisasi fisik sebesar 100%, pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar 60.46%. Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah ditargetkan realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar 97.79%

2. Indikator 1 : Jumlah aset perkantoran yang terpenuhi dan dipelihara

Indikator dengan jumlah aset perkantoran yang terpenuhi dan dipelihara sebanyak 22 jenis, telah dilaksanakan sebanyak 22 jenis sehingga mencapai 100%, dimana Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh Pengurus Barang selalu melakukan pengecekan dan evaluasi aset setiap triwulan dalam rangka pemeliharaan aset kantor Satpol PP serta peralatan dan perlengkapan Damkar baik Pos Induk maupun pos sektor yang ada di Kecamatan.

3. Indikator 2 : Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan kepegawaian

Indikator dengan jumlah dokumen administrasi perkantoran dan kepegawaian sebanyak 1 dokumen, telah dilaksanakan sehingga capaian 100%, yaitu melaksanakan pengarsipan pengadministrasian pegawai selama 1 tahun bagi ASN yang naik pangkat, ASN yang melaksanakan purna tugas/pensiun, absensi kehadiran personil, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta penyediaan peralatan rumah tangga.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor anggaran sebesar Rp.5.020.620,- dengan realisasi sebesar Rp.4.372.130,- atau 87%
- 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor anggaran sebesar Rp.123.967.543,- dengan realisasi sebesar Rp.116.234.246,- atau 93.76%%
- 3) Penyediaan peralatan rumah tangga anggaran sebesar Rp.8.103.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.450.000,- atau 91.94%
- 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan anggaran sebesar Rp.3.262.333,- dengan realisasi sebesar Rp.3.101.400,- atau 95%
- 5) Penyediaan bahan material anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.000.000 atau 100%
- 6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD anggaran sebesar Rp.348.980.000,- dengan realisasi sebesar Rp.348.629.510,- atau 99.90%

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik anggaran sebesar Rp.131.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.79.202.555,- atau 60.46%

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/atau kendaraan dinas jabatan anggaran sebesar Rp.34.410.000,- dengan realisasi sebesar Rp.34.065.000,- atau 99%
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan anggaran sebesar Rp.622.804.800,- dengan realisasi sebesar Rp.619.674.054,- atau 99.50%
- 3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya anggaran sebesar Rp.149.490.000,- dengan realisasi sebesar Rp.135.205.000,- atau 90%

Adapun Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp.499.333.496,- dengan realisasi sebesar Rp.489.787.286,-. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp.131.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.79.202.555,-. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp.806.704.800,- dengan realisasi sebesar Rp.788.944.054,- sehingga total anggaran sebesar Rp.1.437.038.296,- dengan realisasi sebesar Rp.1.357.933.895,- atau 94.49%

4.4 Kepala Seksi Pengamanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1.	Melaksanakan pengamanan kegiatan Pemda dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan	144 kali	144 kali	33 kasus	33 kasus	100%

		patroli, pengamanan dan pengawalan					
	Rata-rata capaian kinerja tahun 2023						100%

1. **Sasaran : Melaksanakan Pengamanan Kegiatan Pemda dan Pengawalan**
2. **Indikator : Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan sebanyak 33 kasus**

Berdasarkan sasaran diatas, Seksi Pengamanan telah melaksanakan pengamanan baik kegiatan Pemerintah Daerah berupa pelaksanaan hari-hari besar maupun hari-hari tertentu serta melaksanakan pengawalan Bupati maupun DPRD. Disamping itu juga melaksanakan patroli disepanjang jalan dan tempat yang rawan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat sebanyak 33 kasus yang ditangani dan terselesaikan pula sebanyak 33 kasus sehingga kegiatan fisik sudah mencapai 100%

Kegiatan yang terkait dengan pengamanan adalah kegiatan penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan dengan realisasi fisik 100% serta untuk Sub Kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota dengan realisasi fisik 100%.

Adapun anggaran Seksi Pengamanan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel.4.4.1
Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Efisiensi Sasaran Strategis

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1.477.703.818	1.454.844.000	98,45
Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	787.439.568	782.005.000	99.31
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota	690.264.250	672.839.000	97.48

Tabel.4.4.2
Efisiensi Sasaran Strategis

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	98.45%	1.55%

4.5 Kepala Seksi Pengendalian dan Penindakan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1.	Melaksanakan patroli / penertiban dan Razia Keamanan Lingkungan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada	360 kali	360 kali	10 kasus	10 kasus	100%
	Rata-rata capaian kinerja tahun 2023						100%

1. **Sasaran : Melaksanakan Patroli/Penertiban dan Razia Keamanan Lingkungan**
2. **Indikator : Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada sebanyak 10 kasus**

Berdasarkan sasaran diatas, Kegiatan Seksi Pengendalian dan Penindakan telah melaksanakan penertiban dilapangan dan razia keamanan lingkungan berupa razia-razia terhadap warung malam, warung yang mempekerjakan anak di bawah umur, para gelandangan/gepeng yang terindikasi mengganggu ketentraman masyarakat, para pemuda yang diduga mengkonsumsi minuman keras/minuman beralkohol maupun obat-obatan terlarang dengan jumlah indikator sebanyak 10 kasus, yang ditangani dan terselesaikan sebanyak 10 kasus sehingga kegiatan fisik mencapai 100%.

Kegiatan yang terkait dengan pengendalian dan penindakan adalah kegiatan penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan realisasi fisik 100% telah dilaksanakan.

Sedangkan untuk anggaran Seksi Pengendalian dan Penindakan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel.4.5.1
Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Efisiensi Sasaran Strategis

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	92.560.000	90.020.000	97.26

Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	92.560.000	90.020.000	97.26
---	------------	------------	-------

Tabel.4.5.2
Efisiensi Sasaran Strategis

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	97.26%	2.74%

4.6 Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi i 2022	Target 2023	Realisasi i 2023	Capaian 2023
1.	Menyelesaikan pelanggaran Perda/Perkada terkait keamanan dan ketertiban umum	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dapat ditangani sesuai SOP	55 kasus	55 kasus	12 laporan	12 laporan	100%
	Rata-rata capaian kinerja tahun 2023						100%

- 1. Sasaran : Menyelesaikan pelanggaran Perda/Perkada terkait keamanan dan ketertiban umum**
- 2. Indikator : Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dapat ditangani sesuai SOP sebanyak 12 laporan**

Berdasarkan sasaran diatas, Kegiatan Seksi Penyidikan dan Penyelidikan telah menyelesaikan penanganan masalah pelanggaran Perda untuk tahun 2023 sebanyak 128 kasus terdiri dari Perkara Sanksi Syariah sebanyak 74 kasus, Perkara Tipiring Miras sebanyak 27 kasus, Surat Pernyataan warung malam (tempat hiburan, mempekerjakan anak di bawah umur, pengamen, hotel / kost) sebanyak 27 kasus, dilaporkan serta ditangani selesai sebanyak 128 kasus sehingga target tercapai 100%

Dibandingkan dengan tahun 2022 penanganan pelanggaran Perda hanya mencapai 102 kasus ditangani dan dilaporkan selesai. Ternyata tahun ini mengalami peningkatan dari tahun 2022. Dengan meningkatnya kembali pelanggaran terhadap Perda / Perkada maka perlu ditingkatkan Kembali melalui sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda / Perkada dan penanganan atas pelanggaran Perda / Perkada.

Adapun Anggaran dan Realisasi Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel.4.6.1
Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Efisiensi Sasaran Strategis

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum			
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	131.720.635	123.070.300	93,43
Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota	131.720.635	123.070.300	93,43

Tabel.4.6.2
Efisiensi Sasaran Strategis

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	93.43%	6.57%

4.7 Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targe t 2022	Realisas i 2022	Target 2023	Realisas i 2023	Capaia n 2023
1.	Sosialisas i Perda dan Perkada	Jumlah laporan hasil pelaksana pengawasa n yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaa n perda dan perkada	25 kali	25 kali	12 lapora n	12 laporan	100%
		Jumlah laporan hasil pelaksanaa n pening katan kapasitas Peja bat PPNS dalam mendukun g penye lenggaraan ketertiban umum dan keten traman masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	-	-	4 lapora n	3 laporan	100%
	Rata-rata capaian kinerja tahun 2023						100%

1. **Sasaran : Sosialisasi Perda dan Perkada**
2. **Indikator 1 : Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada selama 12 laporan**
3. **Indikator 2 : Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada sebanyak 4 laporan**

Berdasarkan sasaran diatas, Kegiatan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun pembinaan terkait Perda dan Perkada kepada masyarakat khususnya pedagang UMKM, warung-warung malam, para pemuda yang nongkrong di jalanan, memberikan pembinaan kepada warga yang memasang baliho berlebihan, untuk patuh dan mentaati Peraturan Daerah yang berlaku. Bagi warga yang melanggar Perda akan mendapatkan sanksi. Karena masih banyak masyarakat yang belum memahami Peraturan tersebut sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi dan selalu meningkat. Untuk itu Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan bersama Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan yang didampingi oleh Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada selalu melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan kepada masyarakat terhadap Peraturan Daerah untuk mengurangi pelanggaran. Dilaksanakan dan dilaporkan setiap bulan selama 12 bulan sehingga target terpenuhi 100%.

Disamping melaksanakan pembinaan dan penyuluhan Bidang Penegakan Perda dan Perkada telah melaksanakan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk tahun 2023 telah mengirim 2 orang pejabat untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dilaksanakan oleh Kemendagri di Jakarta selama 3 bulan sehingga target untuk 2 laporan dapat direalisasikan ditambah dengan 1 kegiatan PPNS terkait kegiatan dilapangan dan

pembayaran honorarium berdasarkan SK Bupati Tanah Laut yang di bayar sesuai dengan Jabatan PPNS dapat direalisasikan 1 laporan. Sementara untuk target tahunan sebanyak 4 laporan direalisasikan sebanyak 3 laporan dikarenakan kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota untuk Diklat PPNS tersebut anggarannya tidak mencukupi sehingga terjadi ketidak efisienan kinerja.

Adapun Anggaran dan Realisasi Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel.4.7.1
Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Efisiensi Sasaran Strategis

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum			
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	57.545.281	56.885.000	98,85
Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati / walikota	57.545.281	56.885.000	98,85

Tabel.4.7.2
Efisiensi Sasaran Strategis

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	98.85%	1.15%

4.8 Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targe t 2022	Realisas i 2022	Targe t 2023	Realisas i 2023	Capaia n 2023
1.	Melaksanak an Pembinaan Kompetensi SDA Satpol	Jumlah anggota yang terlatih	173 orang	173 orang	-	-	100%

	PP dan Damkar						
		Jumlah anggota Satpol PP yang bersertifikat	46 orang	46 orang	-	-	100%
		Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang di tingkatkan kapasitasnya	-	-	173 orang	173 orang	100%
	Rata-rata capaian kinerja tahun 2023						100%

1. **Sasaran : Melaksanakan Pembinaan Kompetensi SDA Satpol PP dan Damkar**
2. **Indikator 1 : Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 173 orang**

Berdasarkan sasaran diatas, di Tahun 2023 ini Seksi Pembinaan dan Pengawasan telah melaksanakan kegiatan rutin pembinaan mental Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas anggota karena pada tahun 2022 anggota telah ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 173 orang guna melaksanakan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM untuk anggota Satpol PP di Rindam IV Mulawarman Banjarbaru selama 10 hari.

Adapun Anggaran dan Realisasi Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel.4.8.1
Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Efisiensi Sasaran Strategis

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/Kota	4.777.651.000	4.517.037.877	94,55
Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak azasi manusia	4.777.651.000	4.517.037.877	94,55

Tabel.4.8.2
Efisiensi Sasaran Strategis

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	94.55%	5.45%

4.9 Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1.	Melaksanakan Pelatihan SDA Satlinmas	Anggota Satlinmas yang memiliki Sertifikat	46 orang	46 orang	-	-	100%
		Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	-	-	11 dokumen	11 dokumen	100%
	Rata-rata capaian kinerja tahun 2023						100%

1. **Sasaran : Melaksanakan Pelatihan SDA Satlinmas**
2. **Indikator 1 : Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum**

Berdasarkan sasaran diatas, setiap minggu Seksi Perlindungan Masyarakat telah melaksanakan kegiatan pelatihan sumber daya aparatur anggota bagi Satlinmas.

Adapun Jumlah Satlinmas yang telah dilaksanakan pelatihan terdiri dari 11 Kecamatan sebanyak 395 orang yang masing-masing Kecamatan berjumlah 40 orang dari Kecamatan Bajuin, Kurau, Bumi Makmur, Takisung, Panyipatan, Batu Ampar, Jorong, Kintap, Pelaihari, Tambang Ulang dan Bati-Bati. Karena telah melaksanakan di 11 Kecamatan sehingga sudah melaksanakan 100%.

Tabel 4.9.1
Jumlah Satlinmas yang dikukuhkan sebanyak 1.875 orang

Kecamatan	Desa	Jumlah Peserta
Pelaihari	20	440
Bajuin	9	118
Tambang Ulang	9	104
Kurau	11	96
Bumi Makmur	11	121
Bati-bati	14	201
Takisung	12	149
Panyipatan	10	130
Batu Ampar	14	201
Jorong	11	135
Kintap	14	180
Jumlah	135	1875

Sumber data : Bidang Sumberdaya Aparatur

Adapun Anggaran dan Realisasi Seksi Perlindungan masyarakat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel.4.9.2
Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Efisiensi Sasaran Strategis

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/Kota	166.212.440	137.590.856	82.78
Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	166.212.440	137.590.856	82.78

Tabel.4.9.3
Efisiensi Sasaran Strategis

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	82.78%	17.22%

5.0 Kepala Seksi Perlindungan Kesiapsiagaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1.	Melaksanakan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana Damkar yang sesuai standar dan layak pakai	8 item	8 item	-	-	100%
		Jumlah anggota Damkar yang terlatih dan bersertifikat	10 orang	10 orang	-	-	100%
		Jumlah Dokumen NSPM pencegahan, penanggulangan kebakaran dalam daerah	-	-	6 dokumen	6 dokumen	100%

2.	Melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran	Jumlah penyuluhan bahaya kebakaran	6 kali	6 kali	-	-	100%
	Rata-rata capaian kinerja tahun 2023						100%

1. Sasaran : Melaksanakan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran

2. Indikator 1 : Jumlah dokumen NSPM pencegahan, penanggulangan kebakaran dalam daerah

Berdasarkan sasaran diatas, melaksanakan kesiapsiagaan bahaya kebakaran merupakan pelayanan dasar Kegiatan Damkar, pada saat musim kemarau sering terjadi kebakaran di lahan-lahan persawahan, rumah warga juga ada yang mengalami kebakaran, sehingga Seksi kesiapsiagaan harus mempersiapkan semuanya baik dari sarana maupun prasarana kebakaran. Untuk peralatan pemadaman masih ada kekurangan sehingga perlu penambahan anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan pemadaman.

Adapun pos sektor yang sudah ada pos damkar nya di Kecamatan-Kecamatan ada 6 Pos Sektor Yaitu Pos Sektor Kintap, Takisung, Kurau, Panyipatan, Jorong, Bati-Bati. Sedangkan untuk 4 Pos yang belum ada Pos Damkarnya adalah Pos Sektor Batu Ampar, Bajuin, Tambang Ulang, dan Bumi Makmur.

Untuk kegiatan Seksi Kesiapsgiaan setiap bulan selalu ada permintaan dari Sekolah, Kantor, Desa, Kelurahan, atau dari masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi atau pembinaan pencegahan kebakaran terhadap masyarakat/warga. Atau sosialisasi cara menangani kebakaran gas elpigi yang cepat.

Sedangkan untuk anggaran dan realisasi Seksi Kesiapsiagaan sebagai berikut:

Tabel.5.0.1
Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Efisiensi Sasaran Strategis

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pencegahan, pengendalian, penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun			
Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	235.254.762	184.526.600	78.44
Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	235.254.762	184.526.600	78.44

Tabel.5.0.2
Efisiensi Sasaran Strategis

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	78.44%	21.56%

5.1 Kepala Seksi Kedaruratan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1.	Melaksanakan penanganan kebakaran	Jumlah kebakaran yang ditangani tuntas	140 kasus	140 kasus	-	-	100%
		Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	-	-	1152 laporan	1152 laporan	100%
	Rata-rata capaian kinerja tahun 2023						100%

1. **Sasaran : Melaksanakan Penanganan Kebakaran**
2. **Indikator 1 : Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota**

Berdasarkan sasaran diatas, melaksanakan penanganan kebakaran juga merupakan pelayanan dasar Kegiatan Damkar.

Untuk jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) tahun 2023 sebanyak 735 orang. Adapun jenis penyelamatan dan evakuasi yaitu ular, tawon, anjing, biawak, buaya, musang, mobil tercebur, manusia (lepas cincin), tiang listrik, pohon tumbang dan lain-lain yang bisa membahayakan manusia sehingga dapat terselesaikan 100%.

Untuk data kejadian kebakaran tahun 2023 sebanyak 309 kejadian kebakaran dengan jumlah waktu tanggap seluruh kejadian adalah 25.983 menit dibagi 309 kejadian sehingga jumlah respon adalah 84 menit per kejadian.

Sedangkan untuk anggaran dan realisasi Seksi Kedaruratan sebagai berikut:

Tabel.5.1.1
Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Efisiensi Sasaran Strategis

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pencegahan, pengendalian, penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun			
Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	296.756.440	295.590.000	99.61
Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	296.756.440	295.590.000	99.61

Tabel.5.1.2
Efisiensi Sasaran Strategis

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	99.61%	0.39%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023

Anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari 2 jumlah belanja yaitu belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan ASN, belanja barang belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanjaa perjalanan dinas. Sedangkan untuk Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal alat bengkel dan alat ukur, belanja modal alat kantor dan rumah tangga, belanja modal komputer dapat dilihat pada tab berikut ini:

Tabel 5.1.3
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja tahun 2023

No	Jenis Belanja	2023
1.	Belanja Operasi	
1.1	Belanja Pegawai	5.997.032.349
1.2	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.036.655.705
1.3	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.960.376.644
1.4	Belanja Barang dan Jasa	8.123.956.235
1.5	Belanja Barang	385.892.582
1.6	Belanja Jasa	6.276.701.432
1.7	Belanja Pemeliharaan	737.333.504
1.8	Belanja Perjalanan Dinas	724.028.717
2.	Belanja Modal	
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.820.500
2.2	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	27.926.000
2.3	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	101.344.500
2.4	Belanja Modal Komputer	70.550.000
3.	Jumlah Belanja	
4.	Surplus / Defisit	

Sumber : Kasubbag Keuangan

Untuk anggaran dan realisasi APBD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel.5.1.4
Anggaran dan Realisasi Tahun 2023

No	Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6	7
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				8.226.928.782		
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		11.999.544	11.145.800	92.88
	1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		4 dok	5.999.772	5.9952.400	99.41
	2.	Evaluasi kinerja perangkat daerah		6 laporan	5.999.772	5.193.400	86.56
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah		6.776.890.942	6.002.399.549	88.57
	3.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		48orang	6.766.555.914	5.997.032.349	88.63
	4.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD		5 dok	10.335.028	5.357.200	51.84
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah		499.333.496	489.787.286	98.08
	5.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.020.620	4.372.130	87.08
	6.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	123.967.543	116.234.246	93.76

1	2		3	4	5	6	7
	7.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	11 paket	8.103.000	7.450.000	91.94
	8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 paket	3.262.333	3.101.400	95.07
	9.	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	1 paket	10.000.000	10.000.000	100
	10.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan	348.980.000	348.629.510	99.90
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		131.000.000	79.202.555	60.46
	11.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	30 laporan	131.000.000	79.202.555	60.46
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		806.704.800	788.944.054	97.79
	12.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	34.410.000	34.065.000	99.00
	13.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	35 unit	622.804.800	619.674.054	99.50

1	2		3	4	5	6	7
	14.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 unit	149.490.000	135.205.000	90.44
II.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				6.803.374.002		
6.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		6.514.127.258	6.199.492.733	95.16
	15.	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	33 kasus	787.439.568	782.005.000	99.31
	16.	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	12 kasus	92.560.000	90.020.000	97.26
	17.	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	1 dokumen	690.264.250	672.893.000	97.48

1	2		3	4	5	6	7
	18.	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	11 dokumen	166.212.440	137.590.856	82.78
	19.	Peningkatan kapasitas SDM dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa hak azasi manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	173 orang	4.777.651.000	4.517.037.877	94.55
7.	Kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		189.265.915	179.955.300	95.08
	20.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	12 laporan	57.545.281	56.885.000	98.85
	21.	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dapat ditangani sesuai SOP	12 laporan	131.720.635	123.070.300	93.43
8.	Pembinaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		99.980.828	89.775.207	89.79

1	2		3	4	5	6	7
	22.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan	4 laporan	99.980.828	89.775.207	89.79
III.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				532.011.202		
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota		Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran		532.011.202	480.116.600	90.24
	23.	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan / penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota setiap tahunnya	6 dokumen	235.254.762	184.526.600	78.44
	24.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	12 laporan	296.756.440	295.590.000	99.61
	Jumlah				15.561.313.986	14.320.809.084	92.03

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Satpol PP dan Damkar telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan DPAP-SKPD Tahun Anggaran 2023 dengan total anggaran sebesar **Rp. 13.561.313.986,-** dengan capaian **Rp.14.320.809.084,-** atau **93,32%** yang terdiri atas 3 program, 9 kegiatan, dan 22 sub kegiatan. Secara keseluruhan realisasi keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Tabel Sasaran Program Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penuntasan pelanggaran perda/ perkada	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11.999.544
	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5.999.772
	Persentase penanganan kebakaran pemukiman			Evaluasi kinerja perangkat daerah	5.999.772
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.776.980.942
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.766.555.914
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	10.335.028
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		499.333.496
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.020.620
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	123.967.543

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
				Penyediaan peralatan rumah tangga	8.103.000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.262.333
				Penyediaan bahan / material	3.480.000
				Penyelenggaraan rapat koordi nasi dan konsultasi SKPD	348.980.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		131.000.000
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	131.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		806.704.800
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	34.410.000
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	622.804.800

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
		Program Peningkatan Ketentraman Dan Keter Tiban Umum			6.803.374.002
			Penangan Gangguan Kententraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota		6.514.127.258
				Pencegahan gangguan keten-traman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan	787.439.568
				Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	92.560.000
				Koordinasi penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	690.264.250

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
				Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	166.212.440
				Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	4.777.651.000
			Penegakan Perda Kab / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota		198.265.916
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	57.545.261
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	131.720.635
			Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri SDipil (PPNS) Kabupaten / Kota		99.980.828

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
			Pengembangan kapasitas dan Karier PPNS		99.980.828
		Program Pencegahan, Pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun			532.011.202
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		532.011.202
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	235.254.762
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	296.756.440
		JUMLAH			13.322.059.818

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 – 2023

Tahun 2022 Satpol PP dan Damkar memperoleh anggaran yang dituangkan dalam DPA-SKPD sebesar **Rp.13.322.059.818,-** sedangkan untuk tahun 2023 sebesar **Rp.15.561.313.986,-** yang terdiri dari:

3.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung tahun 2022 dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan sebesar **Rp. 6.246.703.350,-** dengan realisasi **Rp.5.456.383.637,-** atau **87,34%**

Sedangkan untuk tahun 2023 belanja tidak langsung sebesar **Rp.6.906.555.914,-** dengan realisasi **Rp.5.997.032.349,-** atau **86,83%**

3.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung tahun 2022 untuk membiayai belanja barang dan jasa, belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjenanan dinas serta belanja modal sebesar **Rp.7.075.356.468,-** dengan realisasi **Rp.6.778.580.303,-** atau **95,80%** terdiri dari 3 program, 9 kegiatan, 22 sub kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2023 belanja langsung sebesar **Rp.8.654.758.072,-** dengan realisasi **Rp.8.323.776.735,-** atau **86.83%**

Tabel 5.3
Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022-2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2022				
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.306.527.098	2.614.266.751	79,06%
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.940.176.252	2.842.116.886	96,66%
3.	Belanja Langsung	7.075.356.468	6.778.580.303	95,80%
	Total	13.322.059.818	12.433.126.393	93,32%
	Jumlah Program	3		
	Jumlah Kegiatan	9		
	Jumlah Sub Kegiatan	22		
	Total			
No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023				
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.403.262.549	3.036.655.705	89.22
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.503.293.365	2.960.376.644	84.50
3.	Belanja Langsung	8.654.758.072	8.323.776.735	86.83
	Total	15.561.313.986	14.320.809.084	92.03
	Jumlah Program	3		
	Jumlah Kegiatan	9		
	Jumlah Sub Kegiatan	24		

Tabel 5.4
Tabel Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Tahun 2022-2023

No.	Program / Kegiatan	Anggaran 2022	Realisasi	Anggaran 2023	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9.999.360	9.107.200	11.999.544	11.145.800
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.999.760	4.598.000	5.999.772	5.952.400
2.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	4.999.600	4.509.200	5.999.772	5.193.400
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.251.813.350	5.657.293.090	6.776.890.942	6.002.399.549
3.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6.246.703.350	5.654.546.090	6.766.555.914	5.997.032.349
4.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	5.110.000	2.748.000	10.335.028	5.357.200
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199.100.000	124.200.000	-	-
5.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	199.100.000	124.200.000	-	-
IV.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.491.497	266.533.472	499.333.496	489.787.286
6.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.330.306	2.999.000	5.020.620	4.372.130
7.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	67.244.648	60.075.000	123.967.543	116.234.246
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	8.103.000	7.450.000

9.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.436.543	5.546.200	3.262.333	3.101.400
10.	Penyediaan Bahan / Material	-	-	10.000.000	10.000.000
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.480.000	3.030.000	-	-
12.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	196.000.000	194.883.272	348.980.000	348.629.510
V.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.757.278.478	4.609.349.097	131.000.000	79.202.555
13.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	109.319.278	65.034.005	131.000.000	79.202.555
VI.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.000.000	550.989.932	806.704.800	788.944.054
14.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	25.000.000	24.984.000	34.410.000	34.065.000
15.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	528.000.000	526.005.932	622.804.800	619.674.054
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	149.490.000	135.205.000
B.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
VII.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	791.948.000	780.303.290	6.514.127.258	6.199.492.733

17.	Pencegahan gangguan ketentraman dan ke tertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	10.005.000	9.565.000	787.439.568	782.005.000
18.	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	261.938.000	260.740.790	92.560.000	90.020.000
19.	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	-	-	690.264.250	672.839.000
20.	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	10.005.000	9.997.500	166.212.440	137.590.856
21.	Peningkatan kapasitas SDM dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa hak azasi manusia	510.000.000	500.000.000	4.777.651.000	4.517.037.877
VIII	Kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	159.836.433	116.804.658	189.265.915	179.955.300
20.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati / Walikota	10.003.878	8.477.398	57.545.281	56.885.000
21.	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	149.832.555	108.327.260	131.720.635	123.070.300
8.	Pembinaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	99.980.828	89.775.207

22.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPN	-	-	99.980.828	89.775.207
III.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				
9.	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota	322.592.700	317.544.645	532.011.202	480.116.600
23.	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	-	-	235.254.762	184.526.600
24	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	322.592.700	317.544.645	296.756.440	295.590.000
	J U M L A H	13.322.059.818	12.433.126.393	15.561.313.986	14.320.809.084

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023. Se jauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LKj ini.

Satpol PP dan Damkar telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan DPAP-SKPD Tahun Anggaran 2023 dengan total anggaran sebesar **Rp. 15.561.313.986,- dengan realisasi Rp.14.320.809.084,- atau 92,03%** yang terdiri atas 3 Program, 9 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan. Secara keseluruhan realisasi keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan tahun 2023

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat indikator sasaran strategis yang tidak tercapai. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang terdiri atas 1 (satu) sasaran IKU dengan 3 (tiga) indikator dan 16 (enam belas) sasaran program dengan 16 (enam belas) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%.

B. Strategi Peningkatan Kerja

Meskipun Indikator Sasaran pada tahun 2023 dapat tercapai, namun untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikut sertakan Diklat yang sesuai dengan tupoksinya;
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk penunjang pelayanan publik;

3. Mengoptimalkan koordinasi pemangku kepentingan sebagai informasi penting bagi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Rutin melaksanakan evaluasi berkala (monev) atas hasil kegiatan
5. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran strategis.
6. Memahami dan menerapkan SOP yang berlaku

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dibuat semoga dapat menjadi bahan informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja.

Pelaihari, Januari 2024
Kepala Satuan



MUH. KUSRI, SP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690315 199803 1 012

**LAPORAN PENCAPAIAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA
SATPOL PP DAN DAMKAR TAHUN 2023**

No	Tujuan / Sasaran RKPD	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Capaian								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Penanggung jawab	Permasalahan	Solusi
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
			Kinerja (%)	Rp	Kinerja (%)	Rp	Kinerja (%)	Rp	Kinerja (%)	Rp	Kinerja (%)	Rp	Kinerja (%)	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Meningkatkan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	11,999,544	25	2,499,800	50	6,429,200	75	9,634,800	100	11,145,800	100	11,145,800	Sekretariat	- Pergantian pejabat karena adanya mutasi atau promisi yang begitu cepat sehingga menjadi kendala dalam penyelesaian pekerjaan	- Penempatan pejabat sebagian melihat dari kemampuan dan latar belakang pendidikan yang bersesuai sehingga mampu untuk bekerja dan berkomunikasi menjadi lebih baik
		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100	6,776,890,942	25	1,100,592,154	50	3,294,756,406	75	4,626,229,709	100	6,002,389,549	100	6,002,389,549	Sekretariat	- Pada realisasi amggaran tahun 2023 mencapai 92,03%, tidak bisa sepbuhnya direalisasikan karena ada perbedaan pengusulan SSH, SSB dengan sehingga pagunya mengalami silfa	- Sebelum membuat pra RKA para PPTK harus merumuskan terlebih dahulu kegiatan yang akan dilaksanakan, melaksanakan survey pasar bagi pembelian barang, menganggarkan pajak pembelian sehingga bisa menyesuaikan SSH nva.
		Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah	100	630,333,496	25	213,599,706	50	250,685,353	75	304,159,144	100	568,989,841	100	568,989,841	Sekretariat	- Penempatan pejabat yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak bersesuaian dengan bidang tugas menjadi tanggung jawabnya Regulasi yang sering berubah/ berganti karena penyesuaian	- Adanya peraturan regulasi yang saling berhubungan/sinerj a dibuat lebih mudah dan bisa dipakai oleh pengguna lainnya
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	806,704,800	25	127,787,150	50	290,343,750	75	441,083,704	100	788,944,054	100	788,944,054	Sekretariat		

No	Tujuan / Sasaran RKPD	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Capaian								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Penanggung jawab	Permasalahan	Solusi
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
			Kinerja (%)	Rp	Kinerja (%)	Rp	Kinerja (%)	Rp	Kinerja (%)	Rp	Kinerja (%)	Rp	Kinerja (%)	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada	100	6,803,374,002	25	1,332,053,741	50	2,914,102,562	75	4,845,151,883	100	6,469,223,240	100	6,469,223,240	Kepala Satuan, Bidang Gakda, Bidang Trantibum	1. Bidang Penegakan Perda - Masih tingginya angka pelanggaran Perda/Perkada di Kabupaten Tanah Laut - Kurangnya SDA PPNS - Sarana dan prasarana yang belum mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran Perda/Perkada tersebut - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan akan Perda/Perkada tersebut 2. Bidang Ketertarikan dan ketertiban Umum - Kurangnya ejukasi dan kesadaran kepada masyarakat seperti mempekerjakan anak di bawah umur	- Dengan melaksanakan kegiatan yang lebih efektif yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku - Mengikutsertakan SDA dalam diklat PPNS - Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan - Perluunya peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan Perda/Perkada kepada masyarakat - Meningkatkan patroli/razia di tempat-tempat yang diduga menjadi sumber kerawanan

No	Tujuan / Sasaran RKP	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Capaian								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2023)		Penanggung jawab	Permasalahan	Solusi
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
			Kinerja (%)	Rp	Kinerja (%)	Rp	Kinerja (%)	Rp	Kinerja (%)	Rp	Kinerja (%)	Rp	Kinerja (%)	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran	100	532,011,202	25	57,650,000	50	144,955,000	75	268,111,000	100	480,116,600	100	480,116,600	Kepala Satuan, Bidang Damkar	- Sering ditemui adanya back up dari pihak ketiga yang melewatkan kegiatan - Tidak jarang timbul perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan - Masih kurangnya anggota Damkar yang memiliki keahlian Pemadam I - Ketersediaan tenaga Pemadam Kebakaran yang dirasa masih kurang - Pengisian Pos Sektor dan penunjang peralatan yang masih belum lengkap - Terkendalanya penyediaan sumber air di saat kemarau panjang	- Membuka layanan online (reaksi cepat) yang gampang dan mudah diakses oleh masyarakat - Melaksanakan sosialisasi pada setiap pertemuan, rapat, dan kegiatan lainnya - Mengikutsertakan anggota Damkar untuk keahlian Pemadam I - Karena adanya pemutusan hubungan kontrak terhadap salah satu anggota Damkar sehingga perlu mengaktifkan para relawan yang ada dikuatkan dengan SK Bupati Tanah Laut - Secara bertahap sudah dialokasikan pada tahun 2024 baik penambahan alat maupun peningkatan kapasitas - Menambah baru potensi sumur bor yang diperkirakan cukup pada saat kemarau panjang
			15,561,313,986		2,834,182,551		6,901,272,271		10,494,370,240		14,320,809,084		14,320,809,084				



Pelaihari, Desember 2023
Kepala Satuan

MUHUSRI SP
NP 19600315 199803 1 012

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten

: Tanah Laut

Nama SKPD

: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tugas

: Melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang penegakan Perundang-undangan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat, Kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.

Fungsi

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan teknis Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas
- e. Pembinaan UPT
- f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran Perda/Perkada	$\frac{\sum \text{Pelanggaran Perda / Perkada yang diselesaikan}}{\sum \text{Pelanggaran Perda / Perkada yang dilaporkan}} \times 100\%$	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
	Persentase penyelesaian gangguan dan ketentraman dan ketertiban umum	$\frac{\sum \text{Gangguan tibumtranmas Yang diselesaikan}}{\sum \text{Gangguan tibumtranmas Yang dilaporkan}} \times 100\%$	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Persentase penanganan kebakaran pemukiman	$\frac{\sum \text{Kebakaran pemukiman yang ditangani}}{\sum \text{Kebakaran pemukiman yang dilaporkan}} \times 100\%$	Bidang Pemadam Kebakaran

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19760203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. SUKAMTA



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jalan A.Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 27 Juni 2023

Nomor : 700.1.2.8/ 159 / LHE- AKIP/Insp/ 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

Kepada Yth.
Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tanah Laut
di –

Pelaihari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800.1.11.1/ 231 / Insp/ 2023 tanggal 31 Mei 2023, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi tentang implelementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Internal. Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Renstra SKPD
- b. Renja SKPD
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU).
- e. Perjanjian Kinerja (PK),
- f. Cascading/ Pohon Kinerja'
- g. Laporan Kinerja'
- h. Dokumen lain yang mendukung.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, memperoleh nilai sebesar 68,95 dengan kategori **B (Baik)**, yaitu (Perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja, pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja)

1. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja.

Diperoleh nilai sebesar 19,80 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori **CC (Cukup (Memadai))**.

b. Pengukuran Kinerja.

Diperoleh nilai sebesar 20,40 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori **CC (Cukup (Memadai))**.

c. Pelaporan Kinerja.

Diperoleh nilai sebesar 10,50 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 15% dengan kategori **B (Baik)**

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Diperoleh nilai sebesar 18,25 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 25% dengan kategori **B (Baik)**

2. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya, dapat diperoleh nilai sebesar 90 % (sembilan puluh persen)

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana di atas, kami menyarankan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja :

- Agar melakukan penyelarasan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja pada tiap-tiap dokumen perencanaan kinerja.
- Agar dilakukan evaluasi berkala terhadap dokumen perencanaan sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja.

b. Pengukuran Kinerja :

- Agar membuat SOP dalam melaksanakan pengumpulan data kinerja sebagai sarana pelaksanaan pengukuran kinerja.
- Agar dilakukan monitoring evaluasi secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja dan dilakukan berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga diketahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian atass target kinerja dan dibuat sebagai dasar perbaikan kinerja

c. Pelaporan Kinerja :

- Agar laporan atas pencapaian kinerja dapat menyajikan data dan analisa yang andal dan memadai, dapat ditelusuri penyajian sumber datanya, diperoleh dari dasar perhitungan yang valid (sah) dan sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya.
- Agar Laporan Kinerja dapat menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang andal dan memadai didalam pelaporan capaian kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :

- Agar dilakukan evaluasi kinerja internal yang merupakan bentuk pemantauan dan mengendalikan kinerja dan dibuat rencana aksi hal ini untuk perbaikan dan akan diketahui target-target yang belum tercapai dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian atas target kinerja.

Dan terhadap hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya agar segera dilakukan penyelesaian, yaitu pada rekomendasi :

Pelaporan Kinerja

Agar laporan atas pencapaian kinerja dapat menyajikan data dan analisa yang andal dan memadai.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PANRB di Jakarta
3. Arsip

LEMBAR KERJA EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PERIODE EVALUASI : 2022

No	Komponen Sub-Komponen	Bobot	Kriteria	Nilai	Persentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00		19.80	66.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	B	4.80	80.00%
1)	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja				
2)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang				
3)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah				
4)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek				
5)	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja				
6)	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja				
7)	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja				
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	C	4.50	50.00%
1)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan				
2)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu				
3)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai				
4)	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai				
5)	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (<i>sustainable</i> - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)				
6)	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART				
7)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (<i>achievable</i>), menantang, dan realistis				
8)	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>Cascading</i>)				

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Kriteria	Nilai	Persentase
9)	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				
10)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.				
11)	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	B	10.50	70.00%
1)	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai				
2)	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai				
3)	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala				
4)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya				
5)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik				
6)	Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
7)	Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
8)	Setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
9)	Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi				
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00		20.40	68.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	CC	3.60	60.00%
1)	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja				
2)	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja				
3)	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan				
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	B	6.30	70.00%
1)	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan				
2)	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan				

No	Komponen/Sub-Komponen	Bobot	Kriteria	Nilai	Persentase
3)	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala				
4)	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang				
5)	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)				
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	B	10.50	70.00%
1)	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja				
2)	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan				
3)	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional				
4)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi				
5)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja				
6)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja				
7)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja				
8)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja				
9)	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja				
10)	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				
11)	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				
3	PELAPORAN KINERJA	15.00		10.50	70.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	B	2.10	70.00%
1)	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi				
5)	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan				
6)	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu				
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi Keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4.50	B	3.15	70.00%
1)	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan				

No	Kritik/uraian/Sub-Komponen	Bobot	Kriteria	Nilai	Persentase
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah				
5)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya				
6)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)				
7)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan				
8)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja				
9)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)				
3.c	Laporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	B	5.25	70.00%
1)	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)				
2)	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai				
3)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja				
4)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja				
5)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
6)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
7)	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi				
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00		18.25	73.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	6.00	B	3.50	70.00%
1)	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
2)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah				
3)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang				
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	BB	6.00	80.00%
1)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar				
2)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai				
3)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai				
4)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah				

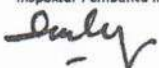
No	Kategori/Sub Komponen	Bobot	Kriteria	Nilai	Persentase
5)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)				
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12,50	B	8,75	70,00%
1)	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti				
2)	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal				
3)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja				
4)	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja				
5)	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal				
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00		68,95	68,95%

Pengendali Teknis

HJ. Rusmiati, MT
NIP. 19651028 198703 2 005

Evaluator

Royadi Saputra, ST
NIP. 19900614 201903 1 005

Mengetahui
Inspektur Pembantu III

HJ. Dwi Laksmi Yuni, ST, MT
NIP. 19700629 199203 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. KUSRI, S.P.

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. SUKAMTA

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

Pihak Kedua,

H. SUKAMTA

Pihak Pertama

MUH. KUSRI, S.P.

NIP. 19690315 199803 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator kinerja	Target
1	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1	Persentase penuntasan pelanggaran Perda/Perkada	100%
		2	Persentase penyelesaian gangguan dan ketentraman dan ketertiban umum	100%
		3	Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,041,793,625	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,999,544	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,999,772	
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,999,772	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,913,390,942	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,906,555,914	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6,835,028	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278,693,139	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,020,620	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,530,186	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,900,000	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,262,333	

5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248,980,000	
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131,000,000	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131,000,000	
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	706,710,000	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34,410,000	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	522,810,000	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149,490,000	
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6,129,944,746	
F	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,940,678,830	
1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	592,440,000	
2.	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	62,560,000	
3.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	791,384,250	
4.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	141,281,580	

5.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	4,353,013,000	
G	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	189,265,916	
1.	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	57,545,281	
2.	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	131,720,635	
H	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	99,980,828	
1.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	99,980,828	
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	282,328,000	
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	282,328,000	
2.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35,565,000	
3.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	246,763,000	
	JUMLAH	14,554,047,199	

Bupati Tanah Laut,

H. SUKAMTA

Pelaihari, Januari 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,

MUH. KUSRI, S.P.
NIP. 19690315 199803 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. DAHLIANI, S.Pt, M.P.
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUH. KUSRI, S.P.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak
Kedua,

MUH. KUSRI, S.P.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19690315 199803 1 012

Pihak
Pertama,

Hj. DAHLIANI, S.Pt, M.P.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19690415 198903 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT

No	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian	100%
		2	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100%
		3	Persentase laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%
		4	Nilai SAKIP	82 Nilai

	Program / Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.298.215.849
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.760
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.600
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.166.703.350
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5.110.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.020.620
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.530.186
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.900.000
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.262.333
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.980.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.000.000

5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.410.000
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	522.810.000
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.490.000

Kepala Satuan,



MUH. KUSRI, S.P.

Pembina Tingkat I / (IV/b)

NIP. 19690315 199803 1 012

Pelaihari, 9 Januari 2023

Sekretaris,



Hj. DAHLIANI, S.Pt, M.P.

Pembina Tingkat I / (IV/b)

NIP. 19690415 198903 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KAISAR MUSLIM, S.H.
Jabatan : Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUH. KUSRI, S.P.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi kewajiban kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak
Kedua,

MUH. KUSRI, S.P.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19690315 199803 1 012

Pihak
Pertama,

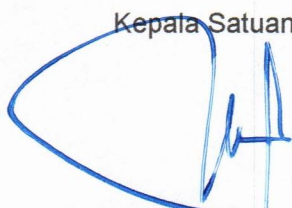
KAISAR MUSLIM, S.H.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19671007 199803 1 004

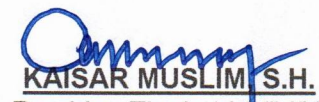
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menurunnya Tingkat Pelanggaran Keamanan Ketentraman, Ketertiban Umum	1 Persentase Jumlah Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%

	Program / Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.446.384.250
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	592.440.000
		2	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	62.560.000
		3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	791.384.250

Pelaihari, 9 Januari 2023
Kepala Bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum,

Kepala Satuan,

MUH. KUSRI, S.P.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19690315 199803 1 012


KAISAR MUSLIM, S.H.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19671007 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASANINOR, S.Sos.
Jabatan : Kabid Penegakan Perundang – Undangan Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUH. KUSRI, S.P.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak
Kedua,

MUH. KUSRI, S.P.

Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19690315 199803 1 012

Pihak
Pertama,

MASANINOR, S.Sos.

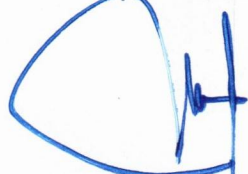
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19710815 200003 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada terkait Ketertiban Umum	1 Persentase Jumlah Penegakan Perda dan Perkada terkait Ketertiban Umum	100%

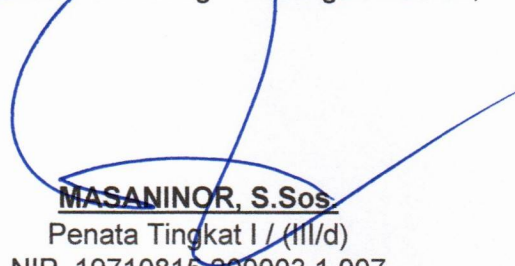
	Program / Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			289.246.744
1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	57.545.281
		2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	131.720.635
2	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	99.980.828

Kepala Satuan,



MUH. KUSRI, S.P.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19690315 199803 1 012

Pelaihari, 9 Januari 2023
Kepala Bidang
Penegakan Perundang - Undangan Daerah,



MASANINOR, S.Sos.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19710815 200003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WANDA ARISANDI, S.S.T, M.T
Jabatan : Kabid Pemadam Kebakaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUH. KUSRI, S.P.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak
Kedua,

MUH. KUSRI, S.P.

Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19690315 199803 1 012

Pihak
Pertama,

WANDA ARISANDI, S.S.T, M.T.

Pembina I / (IV/a)
NIP. 19761206 199803 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1	Persentase Jumlah kecamatan yang memiliki Sarpras Damkar sesuai Standar	55%
		2	Persentase Jumlah Anggota Damkar yang berkualitas	90%
	Program / Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			282.328.000
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.565.000
		2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	246.763.000

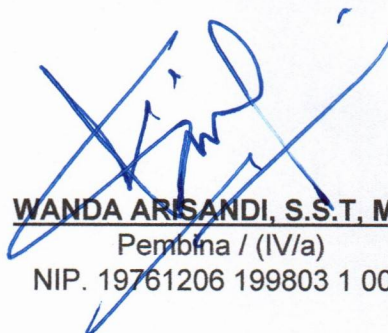
Pelaihari, 9 Januari 2023

Kepala Satuan,



MUH. KUSRI, S.P.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19690315 199803 1 012

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran,



WANDA ARISANDI, S.S.T, M.T.
Pembina / (IV/a)
NIP. 19761206 199803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LASTUTI, S.P.
Jabatan : Kasubbag Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hj. DAHLIANI, S.Pt, M.P.
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak
Kedua,

Pihak
Pertama,

Hj. DAHLIANI, S.Pt, M.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690415 198903 2 008

LASTUTI, S.P.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19741013 199603 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/Bulan
		2 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen

	Program / Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			6.913.390.942
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.906.555.914
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	6.835.028

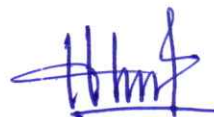
Pelaihari, 9 Januari 2023

Sekretaris,

Kasubbag Keuangan,



Hj. DAHLIANI, S.Pt, M.P.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19690415 198903 2 008



LASTUTI, S.P.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19741013 199603 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENNY FITRIANIE, S. Sos.
Jabatan : Kasubbag Perencanaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hj. DAHLIANI, S.Pt, M.P.
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 6 Januari 2023

Pihak
Kedua,

Hj. DAHLIANI, S.Pt, M.P.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19690415 198903 2 008

Pihak
Pertama,

HENNY FITRIANIE, S.Sos.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19780905 200801 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
		2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan

	Program / Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.999.360
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.760
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.600

Sekretaris,


Hj. DAHLIANI, S.Pt, M.P.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19690415 198903 2 008

Pelaihari, 9 Januari 2023

Kasubbag perencanaan,


HENNY FITRIANIE, S. Sos.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19780905 200801 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSI YANTI, S. A.P.
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hj. DAHLIANI, S.Pt, M.P.
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak
Kedua,

Hj. DAHLIANI, S.Pt, M.P.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19690415 198903 2 008

Pihak
Pertama

SUSI YANTI, S.A.P.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19790226 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Melaksanakan Pemenuhan dan Pemeliharaan Aset Kantor	1	Jumlah aset Perkantoran yang terpenuhi dan dipelihara	22 Jenis
2	Melaksanakan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	1	Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	1 Dokumen

	Program / Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			1.116.403.139
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.020.620
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.530.186
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.900.000
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.262.333
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.980.000
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.000.000
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.410.000
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	522.810.000
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.490.000

Pelaihari, 9 Januari 2023

Sekretaris,



Hj. DAHLIANI, S.Pt, M.P.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19690415 198903 2 008

Kasubbag Umum & Kepegawaian,



SUSI YANTI, S.A.P.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19790226 199803 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RICKY WAHYU UTAMA, S.STP.
Jabatan : Kasi Pengamanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : KAISAR MUSLIM, S.H.
Jabatan : Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi kewajiban kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak
Kedua,

Pihak
Pertama,

KAISAR MUSLIM, S.H.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19671007 199803 1 004

RICKY WAHYU UTAMA, S.STP.
Penata Muda Tingkat I / (III/b)
NIP. 19931225 201708 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pengamanan Kegiatan Pemda dan Pengawasan	1 Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	33 Kasus

	Program / Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	592.440.000
		2	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	791.384.250

Kepala Bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum,



KAISAR MUSLIM, S.H.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19671007 199803 1 004

Pelaihari, 9 Januari 2023

Kepala Seksi Pengamanan,



RICKY WAHYU UTAMA, S.STP.
Penata Muda Tingkat I / (III/b)
NIP. 19931225 200708 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RACHEL H. SIMANJUNTAK, S. STP.
Jabatan : Kasi Pengendalian dan Penindakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : KAISAR MUSLIM, S.H.
Jabatan : Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi kewajiban kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak
Kedua,

Pihak
Pertama,

KAISAR MUSLIM, S.H.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19671007 199803 1 004

RACHEL H. SIMANJUNTAK, S. STP.
Penata Muda Tingkat I / (III/b)
NIP. 19950808 201708 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Melaksanakan Patroli / Penertiban dan Razia Keamanan Lingkungan	1	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	10 Kasus

	Program / Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	62.560.000

Kepala Bidang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum,



KAISAR MUSLIM, S.H.
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19671007 199803 1 004

Pelaihari, 9 Januari 2023

Kepala Seksi Pengamanan,



RACHEL H. SIMANJUNTAK, S.STP.
Penata Muda Tingkat I / (III/b)
NIP. 19950808 201708 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SEPTIADI, S.H.
Jabatan : Kasi Penyidikan dan Penyelidikan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MASANINOR, S.Sos.
Jabatan : Kabid Penegakan Perundang Undangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak
Kedua,


MASANINOR, S.Sos.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19710815 200003 1 007

Pihak
Pertama,


MUHAMMAD SEPTIADI, S.H.
Penata / (III/c)
NIP. 19870901 201502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyelesaikan Pelanggaran Perda / Perkada terkait Keamanan dan Ketertiban Umum	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan

	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
1	Kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Bupati / Walikota	131.720.635

Kepala Bidang Penegakan
Perundang- Undangan Daerah,


MASANINOR, S.Sos.
 Penata Tingkat I / (III/d)
 NIP. 19710815 200003 1 007

Pelaihari, 9 Januari 2023

Kepala Seksi
Penyidikan dan Penyelidikan,


MUHAMMAD SEPTIADI, S.H.
 Penata / (III/c)
 NIP. 19870901 201502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSMANSYAH, S. Sos.
Jabatan : Kasi Pembinaan dan Penyuluhan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MASANINOR, S.Sos.
Jabatan : Kabid Penegakan Perundang – Undangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak
Kedua,

MASANINOR, S.Sos.

Penata Tingkat I / (III/d)

NIP. 19710815 200003 1 007

Pihak
Pertama,

RUSMANSYAH, S.Sos.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19691020 199303 1 005

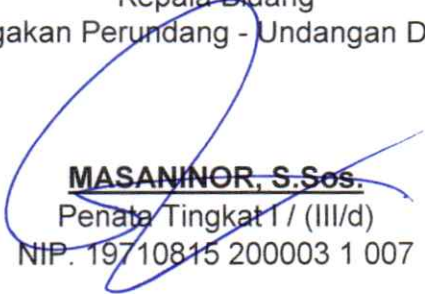
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Sosialisasi Perda dan Perkada	1 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan
		1 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan

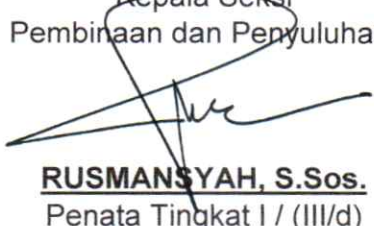
	Program / Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			157.526.109
1	Kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	57.545.281
2	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	99.980.828

Pelaihari, 9 Januari 2023

Kepala Bidang
Penegakan Perundang - Undangan Daerah,


MASANINOR, S.Sos.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19710815 200003 1 007

Kepala Seksi
Pembinaan dan Penyuluhan,


RUSMANSYAH, S.Sos.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19691020 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REZA SYAHRIAN, S.E.
Jabatan : Kasi Pembinaan dan Pengawasan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADHILAH RAHMAN, S.K.M, M.P.H.
Jabatan : Kabid Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 17 Februari 2023

Pihak
Kedua,

FADHILAH RAHMAN, S.K.M, M.P.H

Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19700502 199202 1 002

Pihak
Pertama,

REZA SYAHRIAN, S.E.

Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19820503 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pembinaan Kompetensi SDA Satpol PP dan Damkar	1 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	173 Orang

	Program / Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	4.353.013.000

Pelaihari, 17 Februari 2023

Kepala Bidang
Aparatur dan Perlindungan Masyarakat,



FADHILAH RAHMAN, S.K.M, M.P.H.

Pembina / (IV/a)
NIP. 19700502 199202 1 002

Kepala Seksi
Pembinaan dan Pengawasan,



REZA SYAHRIN, S.E.

Penata Tk. I / (III/d)
NIP. 19820503 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. ALKASIAR HARTONO, S. STP.
Jabatan : Kasi Pembinaan dan Pengawasan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADHILAH RAHMAN, S.K.M, M.P.H.
Jabatan : Kabid Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak
Kedua,

FADHILAH RAHMAN, S.K.M, M.P.H

Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19700502 199202 1 002

Pihak
Pertama,

M. ALKASAR HARTONO, S. STP.

Penata Muda Tingkat I / (III/b)
NIP. 19930703 201708 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Melaksanakan Pembinaan Kompetensi SDA Satpol PP dan Damkar	1	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	173 Orang

	Program / Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	4.353.013.000

Pelaihari, 9 Januari 2023

Kepala Bidang
Aparatur dan Perlindungan Masyarakat,



FADHILAH RAHMAN, S.K.M, M.P.H.

Pembina / (IV/a)
NIP. 19700502 199202 1 002

Kepala Seksi
Pembinaan dan Pengawasan,



M. ALKAISAR HARTONO, S.STP.

Penata Muda Tk. I / (III/b)
NIP. 19930703 201708 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD SYAHRUJI, S.E.
Jabatan : Kasi Perlindungan Masyarakat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADHILAH RAHMAN, S.K.M, M.P.H.
Jabatan : Kabid Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak
Kedua,

FADHILAH RAHMAN, S.K.M, M.P.H.

Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19700502 199202 1 002

Pihak
Pertama,

AKHMAD SYAHRUJI, S.E.

Penata Muda / (III/b)
NIP. 19731118 200604 1 009

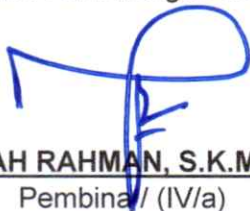
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan pelatihan SDA Satlinmas	1 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11 Dokumen

	Program / Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	141.281.580,00

Pelaihari, 9 Januari 2023

Kepala Bidang
Aparatur dan Perlindungan Masyarakat,



FADHILAH RAHMAN, S.K.M, M.P.H.

Pembina/ (IV/a)
NIP. 19700502 199202 1 002

Kepala Seksi
Perlindungan Masyarakat,



AKHMAD SYAHRUI, S.E.

Penata Muda Tingkat I / (III/b)
NIP. 19731118 200604 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOLEHUN, S.Sos.
Jabatan : Kasi Kesiapsiagaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WANDA ARISANDI, S.S.T, M.T.
Jabatan : Kabid Pemadam Kebakaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

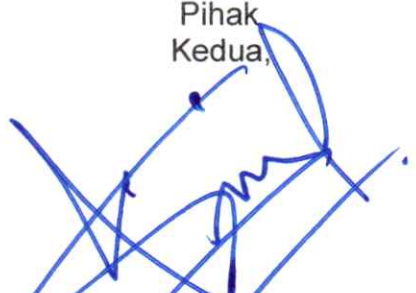
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

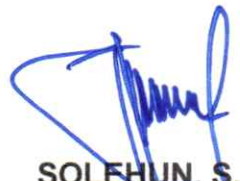
Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak
Pertama,

Pihak
Kedua,



WANDA ARISANDI, S.S.T, M.T.
Pembina / (IV/a)
NIP. 19761206 199803 1 001



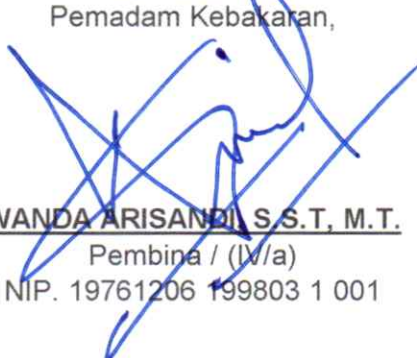
SOLEHUN, S.Sos.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19740725 199703 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Kesiapsiagaan bahaya kebakaran	1 Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah	6 Dokumen

	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	35.565.000

Kepala Bidang
Pemadam Kebakaran,


WANDA ARISANDI, S.S.T, M.T.
Pembina / (IV/a)
NIP. 19761206 199803 1 001

Pelaihari, 9 Januari 2023

Kepala Seksi Kesiapsiagaan,


SOLEHUN, S.Sos.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19740725 199703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARMAN, S.S.T.
Jabatan : Kasi Kedaruratan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WANDA ARISANDI, S.ST, M.T.
Jabatan : Kabid Pemadam Kebakaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

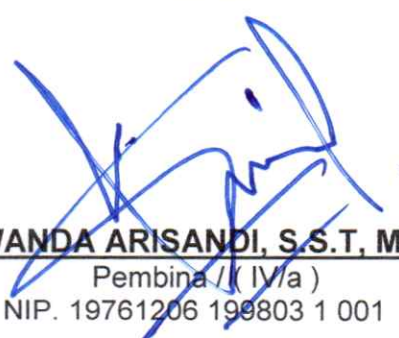
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

Pihak
Kedua,

Pihak
Pertama,


WANDA ARISANDI, S.S.T, M.T.
Pembina / (IV/a)
NIP. 19761206 199803 1 001


ARMAN, S.S.T.
Penata Muda Tingkat I / (III/b)
NIP. 19730608 200701 1 017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS POLISI PAMONG PRAJA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Penanganan Kebakaran	1 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1152 Laporan

	Program / Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON			
1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	246.763.000

Pelaihari, 9 Januari 2023

Kepala Seksi Kedaruratan,

Kepala Bidang
Pemadam Kebakaran,

WANDA ARISANDI, S.S.T, M.T.

Pembina / (I/IIa)

NIP. 19761206 199803 1 001

ARMAN, S.S.T.

Penata Muda Tingkat I / (III/b)

NIP. 19730608 200701 1 017

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. TANAH LAUT
(TRIWULAN I JANUARI S.D MARET TAHUN 2023)

5

No.	Program/Kegiatan		Output Dlm DPA	Target Kinerja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Permasalahan/Kendala	Ket.
						Fisik/Kinerja	%	Keuangan	%			
A	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
I	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	5,999,772	2 Dok	50.00	900,000	15.00	5,099,772		
2	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jlh lap. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5,999,772	3 Laporan	50.00	1,599,800	27	4,399,972		
II	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jlh orang yg menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	6,906,555,914	43 Orang	89.58	1,099,362,154	15.92	5,807,193,760		
4	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dok	6,835,028	2 Dok	40.00	1,230,000	18.00	5,605,028		
III	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
5	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jlh paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	5,020,620	1 Paket	100.00	2,391,630	48	2,628,990		
6	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jlh paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	17,530,186	2 Paket	51.68	9,059,420	51.68	8,470,766		
7	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jlh paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket	3,900,000	3 Paket	100.00	3,250,000	83.33	650,000		
8	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jlh paker barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	3,262,333	0 Paket	-	-	-	3,262,333		
9	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jlh laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	248,980,000	32 Laporan	91.42	191,695,656	76.99	57,284,344		

IV	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
10	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jlh Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yg disediakan	36	Laporan	131,000,000	6	Laporan	16.67	7,203,000	5.50	123,797,000	
V	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
11	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jlh kendr. Perorangan dinas atau kendr. dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	34,410,000	1	Unit	100.00	7,733,000	22.47	26,677,000	
12	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jlh kendr. dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30	Unit	522,810,000	30	Unit	100.00	120,054,150	22.96	402,755,850	
13	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jlh gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	149,490,000	0	Unit	-	-	-	149,490,000	
B	Program	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum											
VI	Kegiatan	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
14	Sub Kegiatan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jlh kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yg dicegah Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	33	Kasus	592,440,000	12	Kasus	36.36	161,475,000	27	430,965,000	

15	Sub Kegiatan	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jlh kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	10	Kasus	62,560,000	3	Kasus	39.24	24,550,000	39.24	38,010,000		
16	Sub Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jlh Dokumen hasil pelaks Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	52	Dok	791,384,250	0	Dok	-	-	-	791,384,250		
17	Sub Kegiatan	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jlh Dokumen yg memuat hasilPemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	11	Dok	141,281,580	0	Dok	-	5,615,000	3.97	135,666,580		
18	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jlh SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatnkan kapasitasnya	173	Orang	4,353,013,000	168	Orang	97.11	1,112,833,741	25.56	3,240,179,259		
VII	Kegiatan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota												
19	Sub Kegiatan	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jlh lap hasil pelaks pengawasan yg dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	12	Laporan	57,545,281	2	Laporan	25.57	14,715,000	25.57	42,830,281		

20	Sub Kegiatan	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jlh lap pelaks penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan yg dpt ditangani sesuai SOP	12	Laporan	131,720,635	3	Laporan	25.00	12,865,000	9.77	118,855,635		
VIII	Kegiatan	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota												
21	Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jlh lap hasil pelaks peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dlm mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	4	Laporan	99,980,828	0	Laporan	-	-	-	99,980,828		
C	Program	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun												
IX	Kegiatan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota												
22	Sub Kegiatan	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jlh dok NSPM pencegahan/penanggu langan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	6	Dok	35,565,000	0	Dok	-	-	-	35,565,000		

23	Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerahKabupaten/Kota	Jlh lap hasil pelaks keg kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	1152 Laporan	246,763,000	119	Laporan	23.00	57,650,000	23	189,113,000		
	JUMLAH			14,554,047,199			45.03	2,834,182,551	19.47	11,719,864,648		

Pelaihari, April 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,
Kabupaten Tanah Laut



**LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. TANAH LAUT
(TRIWULAN II APRIL S.D JUNI TAHUN 2023)**

No.	Program/Kegiatan		Output Dlm DPA	Target Kinerja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Permasalahan/Kendala	Ket.
						Fisik/Kinerja	%	Keuangan	%			
A	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
I	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	5,999,772	2 Dok	50.00	2,760,800	46.02	3,238,972		
2	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jlh lap. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5,999,772	4 Laporan	66.67	3,668,400	61.14	2,331,372		
II	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jlh orang yg menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	6,906,555,914	42 Orang	100.00	3,293,054,906	47.68	3,613,501,008		
4	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dok	6,835,028	3 Dok	60.00	1,701,500	24.89	5,133,528		
III	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
5	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jlh paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	5,020,620	1 Paket	100.00	2,391,630	48	2,628,990		
6	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jlh paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	17,530,186	4 Paket	100.00	12,862,420	73.37	4,667,766		
7	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jlh paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket	3,900,000	3 Paket	100.00	3,900,000	100.00	-		
8	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jlh paker barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	3,262,333	5 Paket	100.00	1,575,000	48	1,687,333		
9	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jlh laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	248,980,000	35 Laporan	100.00	204,770,096	82.24	44,209,904		

IV	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
10	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jlh Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yg disediakan	36	Laporan	131,000,000	18	Laporan	50.00	25,186,207	19.23	105,813,793	
V	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
11	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jlh kendr. Perorangan dinas atau kendrn dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	34,410,000	1	Unit	100.00	17,100,000	49.69	17,310,000	
12	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jlh kendr. dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30	Unit	522,810,000	30	Unit	100.00	273,243,750	52.26	249,566,250	
13	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jlh gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	149,490,000	0	Unit	-	-	-	149,490,000	
B	Program	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum											
VI	Kegiatan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
14	Sub Kegiatan	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jlh kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yg dicegah Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	33	Kasus	592,440,000	13	Kasus	81	477,515,000	81	114,925,000	

15	Sub Kegiatan	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jlh kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	10	Kasus	62,560,000	7	Kasus	78.29	48,980,000	78.29	13,580,000		
16	Sub Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jlh Dokumen hasil pelaks Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	52	Dok	791,384,250	0	Dok	-	-	-	791,384,250		
17	Sub Kegiatan	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jlh Dokumen yg memuat hasilPemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	11	Dok	141,281,580	4	Dok	36.36	48,310,904	34.19	92,970,676		
18	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jlh SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatnkan kapasitasnya	173	Orang	4,353,013,000	167	Orang	96.53	2,235,567,761	51.36	2,117,445,239		
VII	Kegiatan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota												
19	Sub Kegiatan	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jlh lap hasil pelaks pengawasan yg dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	12	Laporan	57,545,281	2	Laporan	60.52	34,825,000	60.52	22,720,281		

[illegible]

22	Sub Kegiatan : Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jlh dok NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	6	Dok	35,565,000	1	Dok	16.67	4,780,000	13	30,785,000		
23	Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jlh lap hasil pelaks keg kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	1152	Laporan	246,763,000	317	Laporan	57.00	140,175,000	57	106,588,000		
Jumlah					14,554,047,199			66.47	6,901,272,271	47.42	7,652,774,928		

Pelaihari, Juli 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,
Kabupaten Tanah Laut


MUH. KUSRI, SP
NIP. 19690315 199803 1 012

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. TANAH LAUT
(TRIWULAN III JULI S/D SEPTEMBER TAHUN 2023)

No.	Program/Kegiatan		Output Dlm DPA	Target Kinerja		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Permasalahan/Kendala	Ket.
							Fisik/Kinerja	%	Keuangan	%			
A	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				8,041,793,625							
I	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11,999,544							
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	5,999,772	3	Dok	76.94	4,616,400	76.94	1,383,372	
2	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jlh lap. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	5,999,772	4	Laporan	83.64	5,018,400	83.64	981,372	
II	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,913,390,942							
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jlh orang yg menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Orang	6,906,555,914	41	Orang	100.00	4,623,502,709	66.94	2,283,053,205	
4	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok	6,835,028	4	Dok	80.00	2,727,000	39.90	4,108,028	
III	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah				278,693,139							
5	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jlh paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor	1	Paket	5,020,620	1	Paket	100.00	2,948,630	59	2,071,990	
6	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jlh paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Paket	17,530,186	4	Paket	100.00	12,862,420	73.37	4,667,766	
7	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jlh paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3	Paket	3,900,000	3	Paket	100.00	3,900,000	100.00	-	
8	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jlh paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	Paket	3,262,333	5	Paket	100.00	3,101,400	95	160,933	
9	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jlh laporan Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	Laporan	248,980,000	35	Laporan	100.00	242,625,087	97.45	6,354,913	
IV	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				131,000,000							

10	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jlh Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yg disediakan	36	Laporan	131,000,000	30	Laporan	83.33	38,721,607	29.56	92,278,393		
V	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				706,710,000								
11	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jlh kendr. Perorangan dinas atau kendr. dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	34,410,000	1	Unit	100.00	24,012,000	69.78	10,398,000		
12	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jlh kendr. dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30	Unit	522,810,000	30	Unit	100.00	417,071,704	79.78	105,738,296		
13	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jlh gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	149,490,000	0	Unit	-	-	-	149,490,000		
B	Program	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				6,229,925,574								
VI	Kegiatan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				5,940,678,830								
14	Sub Kegiatan	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jlh kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yg dicegah Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	33	Kasus	592,440,000	30	Kasus	97	575,185,000	97	17,255,000		

8	Sub Kegiatan	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jlh kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	10	Kasus	62,560,000	8	Kasus	87.48	54,730,000	87.48	7,830,000		
16	Sub Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jlh Dokumen hasil pelaks Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	52	Dok	791,384,250	52	Dok	100.00	583,605,000	74	207,779,250		
17	Sub Kegiatan	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jlh Dokumen yg memuat hasilPemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	11	Dok	141,281,580	8	Dok	72.73	91,579,916	64.82	49,701,664		
18	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jlh SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatnkan kapasitasnya	173	Orang	4,353,013,000	166	Orang	100.00	3,359,315,070	77.17	993,697,930		
VII	Kegiatan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				189,265,916								
19	Sub Kegiatan	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jlh lap hasil pelaks pengawasan yg dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	12	Laporan	57,545,281	8	Laporan	80.11	46,101,000	80.11	11,444,281		
20	Sub Kegiatan	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jlh lap pelaks penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan yg dpt ditangani sesuai SOP	12	Laporan	131,720,635	9	Laporan	75.00	86,161,000	65.41	45,559,635		

VIII	Kegiatan	Pembinaan Penyidik : Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			99,980,828							
21	Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jlh lap hasil pelaks peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dlm mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	4	Laporan	99,980,828	1	Laporan	48.00	48,474,897	48	51,505,931
C	Program	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun			282,328,000							
IX	Kegiatan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota			282,328,000							
22	Sub Kegiatan	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jlh dok NSPM pencegahan/penanggulan gan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	6	Dok	35,565,000	5	Dok	99.00	35,036,000	99	529,000
23	Sub Kegiatan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jlh lap hasil pelaks kegiatansiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	1152	Laporan	246,763,000	606	Laporan	94.00	233,075,000	94	13,688,000
	JUMLAH				14,554,047,199				85.96	10,494,370,240	72.11	4,059,676,959

Pelaihari, Oktober 2023
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,
 Kabupaten Tanah Laut

 MUH. KUSRI, SP
 NIP. 19690315 199803 1 012

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. TANAH LAUT
(TRIWULAN IV OKTOBER S/D DESEMBER TAHUN 2023)

No.	Program/Kegiatan	Output Dlm DPA	Target Kinerja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Permasalahan/Kendala	Ket.
					Fisik/Kinerja		%	Keuangan	%		
A	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		8,225,928,782							
I	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11,999,544							
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	5,999,772	4	Dok	100	5,952,400	99.21	47,372
2	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jlh lap. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5,999,772	6	Laporan	100	5,193,400	86.56	806,372
II	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6,776,890,942							
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jlh orang yg menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	6,766,555,914	40	Orang	88.63	5,997,032,349	88.63	769,523,565
4	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dok	10,335,028	5	Dok	100	5,357,200	51.84	4,977,828
III	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah		499,333,496							
5	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jlh paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	5,020,620	1	Paket	100	4,372,130	87	648,490
6	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jlh paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	123,967,543	6	Paket	100	116,234,246	93.76	7,733,297
7	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jlh paket peralatan rumah tangga yang disediakan	11 Paket	8,103,000	11	Paket	100	7,450,000	91.94	653,000
8	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jlh paker barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	3,262,333	5	Paket	100	3,101,400	95	160,933
9	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan/Material	Jlh paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	10,000,000	1	Paket	100	10,000,000	100	-
10	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jlh laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	348,980,000	50	Laporan	100	348,629,510	99.90	350,490
IV	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		131,000,000							

Sisa pagu anggaran pada jasa transaksi keuangan

11	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa : Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jlh Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yg disediakan	36	Laporan	131,000,000	36	Laporan	100	79,202,555	60.46	51,797,445		
V	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik : Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				806,704,800								
12	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jlh kendr. Perorangan dinas atau kendrn dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	34,410,000	1	Unit	100	34,065,000	99.00	345,000		
13	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jlh kendr. dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	35	Unit	622,804,800	35	Unit	100	619,674,054	99.50	3,130,746		
14	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi : Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jlh gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	149,490,000	3	Unit	100	135,205,000	90	14,285,000		
B	Program	Peningkatan : Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				6,803,374,002								
VI	Kegiatan	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan : Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				6,514,127,258								
15	Sub Kegiatan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini , Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jlh kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yg dicegah Melalui Deteksi Dini , Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	33	Kasus	787,439,568	33	Kasus	100	782,005,000	99	5,434,568		
16	Sub Kegiatan	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jlh kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	12	Kasus	92,560,000	12	Kasus	100	90,020,000	97.26	2,540,000		

17	Sub Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jlh Dokumen hasil pelaks Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dok	690,264,250	1	Dok	100.00	672,839,000	97	17,425,250	52 laporan
18	Sub Kegiatan	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jlh Dokumen yg memuat hasilPemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	11	Dok	166,212,440	11	Dok	100.00	137,590,856	82.78	28,621,584	
19	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jlh SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	173	Orang	4,777,651,000	94,55	Orang	100.00	4,517,037,877	94.55	260,613,123	
VII	Kegiatan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				189,265,916							
20	Sub Kegiatan	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jlh lap hasil pelaks pengawasan yg dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	12	Laporan	57,545,281	12	Laporan	100.00	56,885,000	98.85	660,281	
21	Sub Kegiatan	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jlh lap pelaks penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan yg dpt ditangani sesuai SOP	12	Laporan	131,720,635	12	Laporan	100.00	123,070,300	93.43	8,650,335	
VIII	Kegiatan	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				99,980,828							
22	Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jlh lap hasil pelaks peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dlm mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	4	Laporan	99,980,828	3	Laporan	90	89,775,207	90	10,205,621	

C	Program	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun			532,011,202								
IX	Kegiatan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota			532,011,202								
23	Sub Kegiatan	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jlh dok NSPM pencegahan/penanggula ngan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	6	Dok	235,254,762	6	Dok	100.00	184,526,600	78	50,728,162	
24	Sub Kegiatan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jlh lap hasil pelaks keg kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	12	Laporan	296,756,440	12	Laporan	100.00	295,590,000	99.61	1,166,440	714 Laporan
	JUMLAH					15,561,313,986			99,58	14,320,809,084	92.03	1,240,504,902	

Pelajari, Januari 2024
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,
 Kabupaten Tanah Laut

 MUH. KUSRI, SP
 NIP. 19690316 199803 1 012

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2023
TRIWULAN I
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.041.793.625,00	8.225.928.782,00	25,00%	2.010.448.410,00	31,39%		1.435.419.390,00			
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.999.544,00	11.999.544,00	25,00%	2.999.886,00	50,00%		2.499.800,00			
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.999.772,00	5.999.772,00	25,00%	1.499.943,00	50,00%	0,02%	900.000,00	15,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.772,00	5.999.772,00	25,00%	1.499.943,00	50,00%	0,02%	1.599.800,00	26,66%	Tidak Ada	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.913.390.942,00	6.776.890.942,00	25,00%	1.728.347.737,00	25,01%		1.100.592.154,00			
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.906.555.914,00	6.766.555.914,00	25,00%	1.726.638.980,00	25,00%	11,86%	1.099.362.154,00	15,92%	Tidak Ada	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.835.028,00	10.335.028,00	25,00%	1.708.757,00	40,00%	0,02%	1.230.000,00	18,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.693.139,00	499.333.496,00	25,00%	69.673.287,00	84,87%		197.337.286,00			
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.020.620,00	5.020.620,00	25,00%	1.255.155,00	100,00%	0,03%	2.391.630,00	47,64%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.530.186,00	123.967.543,00	25,00%	4.382.548,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.900.000,00	8.103.000,00	25,00%	975.000,00	100,00%	0,03%	3.250.000,00	83,33%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.262.333,00	3.262.333,00	25,00%	815.584,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.980.000,00	348.980.000,00	25,00%	62.245.000,00	91,42%	1,56%	191.695.656,00	76,99%	Tidak Ada	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.000.000,00	131.000.000,00	25,00%	32.750.000,00	16,67%		7.203.000,00			
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.000.000,00	131.000.000,00	25,00%	32.750.000,00	16,67%	0,15%	7.203.000,00	5,50%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	706.710.000,00	806.704.800,00	25,00%	176.677.500,00	75,07%		127.787.150,00			
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.410.000,00	34.410.000,00	25,00%	8.602.500,00	22,47%	0,05%	7.733.000,00	22,47%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	522.810.000,00	622.804.800,00	25,00%	130.702.500,00	100,00%	3,59%	120.054.150,00	22,96%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.490.000,00	149.490.000,00	25,00%	37.372.500,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.229.925.574,00	6.803.374.002,00	25,00%	1.557.481.398,00	22,08%		1.332.053.741,00			
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.940.678.830,00	6.514.127.258,00	25,00%	1.485.169.709,00	22,36%		1.304.473.741,00			

1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	592.440.000,00	787.439.568,00	25,00%	148.110.000,00	36,36%	1,48%	161.475.000,00	27,26%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	62.560.000,00	92.560.000,00	25,00%	15.640.000,00	39,24%	0,17%	24.550.000,00	39,24%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	791.384.250,00	690.264.250,00	25,00%	197.846.064,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	141.281.580,00	166.212.440,00	25,00%	35.320.395,00	0,00%	0,00%	5.615.000,00	3,97%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	4.353.013.000,00	4.777.651.000,00	25,00%	1.088.253.250,00	25,00%	7,48%	1.112.833.741,00	25,56%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	189.265.916,00	189.265.916,00	25,00%	47.316.482,00	25,17%		27.580.000,00			
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	57.545.281,00	57.545.281,00	25,00%	14.386.321,00	25,57%	0,10%	14.715.000,00	25,57%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	131.720.635,00	131.720.635,00	25,00%	32.930.161,00	25,00%	0,23%	12.865.000,00	9,77%	Tidak Ada	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	99.980.828,00	99.980.828,00	25,00%	24.995.207,00	0,00%		0,00			
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	99.980.828,00	99.980.828,00	25,00%	24.995.207,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	282.328.000,00	532.011.202,00	25,00%	70.582.000,00	20,10%		57.650.000,00			
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	282.328.000,00	532.011.202,00	25,00%	70.582.000,00	20,10%		57.650.000,00			
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.565.000,00	235.254.762,00	25,00%	8.891.250,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	246.763.000,00	296.756.440,00	25,00%	61.690.750,00	23,00%	0,39%	57.650.000,00	23,36%	Tidak Ada	
		14.554.047.199	15.561.313.986	25,00%	3.638.511.808		27,29%	2.825.123.131	19,41%		



LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2023
TRIWULAN II
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.041.793.625,00	8.225.928.782,00	50,00%	4.020.896.815,00	54,21%		3.842.214.709,00			
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.999.544,00	11.999.544,00	50,00%	5.999.772,00	58,34%		6.429.200,00			
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.999.772,00	5.999.772,00	50,00%	2.999.886,00	50,00%	0,02%	2.760.800,00	46,02%	Tidak Ada	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.772,00	5.999.772,00	50,00%	2.999.886,00	66,67%	0,03%	3.668.400,00	61,14%	Tidak Ada	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.913.390.942,00	6.776.890.942,00	50,00%	3.456.695.472,00	50,01%		3.294.756.406,00			
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.906.555.914,00	6.766.555.914,00	50,00%	3.453.277.958,00	50,00%	23,73%	3.293.054.906,00	47,68%	Tidak Ada	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.835.028,00	10.335.028,00	50,00%	3.417.514,00	60,00%	0,03%	1.701.500,00	24,89%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.693.139,00	499.333.496,00	50,00%	139.346.571,00	97,72%		225.499.146,00			
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.020.620,00	5.020.620,00	50,00%	2.510.310,00	100,00%	0,03%	2.391.630,00	47,64%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.530.186,00	123.967.543,00	50,00%	8.765.094,00	73,37%	0,09%	12.862.420,00	73,37%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.900.000,00	8.103.000,00	50,00%	1.950.000,00	100,00%	0,03%	3.900.000,00	100,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	3.262.333,00	3.262.333,00	50,00%	1.631.167,00	48,00%	0,01%	1.575.000,00	48,28%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.980.000,00	348.980.000,00	50,00%	124.490.000,00	100,00%	1,71%	204.770.096,00	82,24%	Tidak Ada	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.000.000,00	131.000.000,00	50,00%	65.500.000,00	50,00%		25.186.207,00			
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.000.000,00	131.000.000,00	50,00%	65.500.000,00	50,00%	0,45%	25.186.207,00	19,23%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	706.710.000,00	806.704.800,00	50,00%	353.355.000,00	78,85%		290.343.750,00			
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.410.000,00	34.410.000,00	50,00%	17.205.000,00	100,00%	0,24%	17.100.000,00	49,69%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	522.810.000,00	622.804.800,00	50,00%	261.405.000,00	100,00%	3,59%	273.243.750,00	52,26%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.490.000,00	149.490.000,00	50,00%	74.745.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.229.925.574,00	6.803.374.002,00	50,00%	3.114.962.790,00	45,13%		2.914.102.562,00			
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.940.678.830,00	6.514.127.258,00	50,00%	2.970.339.416,00	44,94%		2.810.373.665,00			

1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	592.440.000,00	787.439.568,00	50,00%	296.220.000,00	81,00%	3,30%	477.515.000,00	80,60%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	62.560.000,00	92.560.000,00	50,00%	31.280.000,00	78,29%	0,34%	48.980.000,00	78,29%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	791.384.250,00	690.264.250,00	50,00%	395.692.126,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	141.281.580,00	166.212.440,00	50,00%	70.640.790,00	36,36%	0,35%	48.310.904,00	34,19%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	4.353.013.000,00	4.777.651.000,00	50,00%	2.176.506.500,00	48,00%	14,36%	2.235.567.761,00	51,36%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	189.265.916,00	189.265.916,00	50,00%	94.632.960,00	59,00%		73.350.000,00			
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	57.545.281,00	57.545.281,00	50,00%	28.772.641,00	60,52%	0,24%	34.825.000,00	60,52%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	131.720.635,00	131.720.635,00	50,00%	65.860.319,00	58,33%	0,53%	38.525.000,00	29,25%	Tidak Ada	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	99.980.828,00	99.980.828,00	50,00%	49.990.414,00	30,00%		30.378.897,00			
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	99.980.828,00	99.980.828,00	50,00%	49.990.414,00	30,00%	0,21%	30.378.897,00	30,38%	Tidak Ada	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	282.328.000,00	532.011.202,00	50,00%	141.164.000,00	51,92%		140.955.000,00			
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	282.328.000,00	532.011.202,00	50,00%	141.164.000,00	51,92%		140.955.000,00			
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.565.000,00	235.254.762,00	50,00%	17.782.500,00	16,67%	0,04%	780.000,00	2,19%	Tidak Ada	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	246.763.000,00	296.756.440,00	50,00%	123.381.500,00	57,00%	0,97%	140.175.000,00	56,81%	Tidak Ada	
		14.554.047.199	15.561.313.986	50,00%	7.277.023.605	50,28%		6.897.272.271	47,39%		

cc



LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2023
TRIWULAN III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.041.793.625,00	8.225.928.782,00	75,00%	6.031.345.220,00	76,27%		5.381.311.857,00			
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.999.544,00	11.999.544,00	75,00%	8.999.658,00	80,29%		9.634.800,00			
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.999.772,00	5.999.772,00	75,00%	4.499.829,00	76,94%	0,03%	4.616.400,00	76,94%	Tidak Ada	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.772,00	5.999.772,00	75,00%	4.499.829,00	83,64%	0,03%	5.018.400,00	83,64%	Tidak Ada	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.913.390.942,00	6.776.890.942,00	75,00%	5.185.043.207,00	75,00%		4.626.434.209,00			
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.906.555.914,00	6.766.555.914,00	75,00%	5.179.916.936,00	75,00%	35,59%	4.623.502.709,00	66,94%	Tidak Ada	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.835.028,00	10.335.028,00	75,00%	5.126.271,00	80,00%	0,04%	2.931.500,00	42,89%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.693.139,00	499.333.496,00	75,00%	209.019.855,00	97,72%		265.437.537,00			
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.020.620,00	5.020.620,00	75,00%	3.765.465,00	100,00%	0,03%	2.948.630,00	58,73%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.530.186,00	123.967.543,00	75,00%	13.147.640,00	73,37%	0,09%	12.862.420,00	73,37%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.900.000,00	8.103.000,00	75,00%	2.925.000,00	100,00%	0,03%	3.900.000,00	100,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	3.262.333,00	3.262.333,00	75,00%	2.446.750,00	48,00%	0,01%	3.101.400,00	95,07%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.980.000,00	348.980.000,00	75,00%	186.735.000,00	100,00%	1,71%	242.625.087,00	97,45%	Tidak Ada	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.000.000,00	131.000.000,00	75,00%	98.250.000,00	83,33%		38.721.607,00			
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.000.000,00	131.000.000,00	75,00%	98.250.000,00	83,33%	0,75%	38.721.607,00	29,56%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	706.710.000,00	806.704.800,00	75,00%	530.032.500,00	78,85%		441.083.704,00			
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.410.000,00	34.410.000,00	75,00%	25.807.500,00	100,00%	0,24%	24.012.000,00	69,78%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	522.810.000,00	622.804.800,00	75,00%	392.107.500,00	100,00%	3,59%	417.071.704,00	79,78%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.490.000,00	149.490.000,00	75,00%	112.117.500,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.229.925.574,00	6.803.374.002,00	75,00%	4.672.444.182,00	79,75%		4.845.151.883,00			
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.940.678.830,00	6.514.127.258,00	75,00%	4.455.509.123,00	80,60%		4.664.414.986,00			

1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	592.440.000,00	787.439.568,00	75,00%	444.330.000,00	97,00%	3,95%	575.185.000,00	97,09%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	62.560.000,00	92.560.000,00	75,00%	46.920.000,00	87,48%	0,38%	54.730.000,00	87,48%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	791.384.250,00	690.264.250,00	75,00%	593.538.188,00	100,00%	5,44%	583.605.000,00	73,74%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	141.281.580,00	166.212.440,00	75,00%	105.961.185,00	72,73%	0,71%	91.579.916,00	64,82%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	4.353.013.000,00	4.777.651.000,00	75,00%	3.264.759.750,00	75,00%	22,43%	3.359.315.070,00	77,17%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	189.265.916,00	189.265.916,00	75,00%	141.949.438,00	69,88%		132.262.000,00			
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	57.545.281,00	57.545.281,00	75,00%	43.158.961,00	80,11%	0,32%	46.101.000,00	80,11%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	131.720.635,00	131.720.635,00	75,00%	98.790.477,00	65,41%	0,59%	86.161.000,00	65,41%	Tidak Ada	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	99.980.828,00	99.980.828,00	75,00%	74.985.621,00	48,00%		48.474.897,00			
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	99.980.828,00	99.980.828,00	75,00%	74.985.621,00	48,00%	0,33%	48.474.897,00	48,48%	Tidak Ada	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	282.328.000,00	532.011.202,00	75,00%	211.746.000,00	94,63%		268.111.000,00			
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	282.328.000,00	532.011.202,00	75,00%	211.746.000,00	94,63%		268.111.000,00			
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.565.000,00	235.254.762,00	75,00%	26.673.750,00	99,00%	0,24%	35.036.000,00	98,51%	Tidak Ada	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	246.763.000,00	296.756.440,00	75,00%	185.072.250,00	94,00%	1,59%	233.075.000,00	94,45%	Tidak Ada	
		14.554.047.199	15.561.313.986	75,00%	10.915.535.402	78,12%		10.494.574.740	72,11%		

cc



LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2023
TRIWULAN IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.041.793.625,00	8.225.928.782,00	100,00%	8.225.928.782,00	100,00%		7.371.469.244,00			
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.999.544,00	11.999.544,00	100,00%	11.999.544,00	100,00%		11.145.800,00			
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.999.772,00	5.999.772,00	100,00%	5.999.772,00	100,00%	0,04%	5.952.400,00	99,21%	Tidak Ada	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.772,00	5.999.772,00	100,00%	5.999.772,00	100,00%	0,04%	5.193.400,00	86,56%	Tidak Ada	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.913.390.942,00	6.776.890.942,00	100,00%	6.776.890.942,00	100,00%		6.002.389.549,00			
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.906.555.914,00	6.766.555.914,00	100,00%	6.766.555.914,00	100,00%	43,48%	5.997.032.349,00	88,63%	Tidak Ada	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.835.028,00	10.335.028,00	100,00%	10.335.028,00	100,00%	0,07%	5.357.200,00	51,84%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.693.139,00	499.333.496,00	100,00%	499.333.496,00	100,00%		489.787.286,00			
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.020.620,00	5.020.620,00	100,00%	5.020.620,00	100,00%	0,03%	4.372.130,00	87,08%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.530.186,00	123.967.543,00	100,00%	123.967.543,00	100,00%	0,80%	116.234.246,00	93,76%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.900.000,00	8.103.000,00	100,00%	8.103.000,00	100,00%	0,05%	7.450.000,00	91,94%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.262.333,00	3.262.333,00	100,00%	3.262.333,00	100,00%	0,02%	3.101.400,00	95,07%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	0,06%	10.000.000,00	100,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.980.000,00	348.980.000,00	100,00%	348.980.000,00	100,00%	2,24%	348.629.510,00	99,90%	Tidak Ada	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.000.000,00	131.000.000,00	100,00%	131.000.000,00	100,00%		79.202.555,00			
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.000.000,00	131.000.000,00	100,00%	131.000.000,00	100,00%	0,84%	79.202.555,00	60,46%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	706.710.000,00	806.704.800,00	100,00%	806.704.800,00	100,00%		788.944.054,00			
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.410.000,00	34.410.000,00	100,00%	34.410.000,00	100,00%	0,22%	34.065.000,00	99,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	522.810.000,00	622.804.800,00	100,00%	622.804.800,00	100,00%	4,00%	619.674.054,00	99,50%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.490.000,00	149.490.000,00	100,00%	149.490.000,00	100,00%	0,96%	135.205.000,00	90,44%	Tidak Ada	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.229.925.574,00	6.803.374.002,00	100,00%	6.803.374.002,00	99,85%		6.469.223.240,00			
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.940.678.830,00	6.514.127.258,00	100,00%	6.514.127.258,00	100,00%		6.199.492.733,00			

1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	592.440.000,00	787.439.568,00	100,00%	787.439.568,00	100,00%	5,06%	782.005.000,00	99,31%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	62.560.000,00	92.560.000,00	100,00%	92.560.000,00	100,00%	0,59%	90.020.000,00	97,26%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	791.384.250,00	690.264.250,00	100,00%	690.264.250,00	100,00%	4,44%	672.839.000,00	97,48%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	141.281.580,00	166.212.440,00	100,00%	166.212.440,00	100,00%	1,07%	137.590.856,00	82,78%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	4.353.013.000,00	4.777.651.000,00	100,00%	4.777.651.000,00	100,00%	30,70%	4.517.037.877,00	94,55%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	189.265.916,00	189.265.916,00	100,00%	189.265.916,00	100,00%		179.955.300,00			
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	57.545.281,00	57.545.281,00	100,00%	57.545.281,00	100,00%	0,37%	56.885.000,00	98,85%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	131.720.635,00	131.720.635,00	100,00%	131.720.635,00	100,00%	0,85%	123.070.300,00	93,43%	Tidak Ada	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	99.980.828,00	99.980.828,00	100,00%	99.980.828,00	90,00%		89.775.207,00			
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	99.980.828,00	99.980.828,00	100,00%	99.980.828,00	90,00%	0,58%	89.775.207,00	89,79%	Tidak Ada	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	282.328.000,00	532.011.202,00	100,00%	532.011.202,00	100,00%		480.116.600,00			
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	282.328.000,00	532.011.202,00	100,00%	532.011.202,00	100,00%		480.116.600,00			
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.565.000,00	235.254.762,00	100,00%	235.254.762,00	100,00%	1,51%	184.526.600,00	78,44%	Tidak Ada	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	246.763.000,00	296.756.440,00	100,00%	296.756.440,00	100,00%	1,91%	295.590.000,00	99,61%	Tidak Ada	
		14.554.047.199	15.561.313.986	100,00%	15.561.313.986		99,94%	14.320.809.084	92,03%		



Matrik Keselarasan Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	RENSTRA			PERJANJIAN KINERJA			POHON KINERJA			LAPKIN			KETERANGAN
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran perda dan perkara	100%	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran perda dan perkara	100%	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran perda dan perkara	100%	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran perda dan perkara	100%	
		Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%		Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%		Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%		Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	
		Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%		Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%		Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%		Persentase penanganan kebakaran pemukiman	90%	
												90%	


 Palau, Desember 2023
 Kepala Satuan,
MUH. KUSRI, SP
 PEMBINA UTAMA MUDA I/(IV/c)
 NIP. 19690315 199803 1 012

POHON KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT

